

# PUTUSAN Nomor 116/PHPU.D-XI/2013

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan *putusan akhir* dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **H. Abdul Syukur** 

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Banten

Alamat : Jalan K.H. Hasyim Ashari Nomor 23

RT.004/RW.01, Kelurahan Pinang, Kecamatan

Pinang, Tangerang

2. Nama : Hilmi Fuad, S.T., M.Kom

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Banten

Alamat : Komplek Cipondoh Indah, Jalan Bunga Matahari

Nomor 169, RT.005/RW.005 Kelurahan Cipondoh,

Kecamatan Cipondoh, Tangerang

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 September 2013 memberi kuasa kepada Samsul Huda, S.H.,M.H., Misbahuddin Gasma, S.H.,M.H., Heru Widodo, S.H.,M.Hum., Irfan Rifa'i, S.H., Susanto, S.H., Totok Prasetiyanto, S.H., Robinson, S.H., Dorel Almir, S.H.,M.Kn., Sattu Pali, S.H., Aris Purnomhadi, S.H., Samsudin, S.H., Kristian Masiku, S.H., Syarifuddin, S.H., Melissa Christianes, S.H., Dhimas Pradana, S.H., dan Kamal Abdul Aziz, S.H. selaku advokat/konsultan hukum pada Alfonso & Partners *Law Office*, yang

beralamat di The "H" tower 15th, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 20, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

# Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, berkedudukan di Jalan Nyimas Melati Nomor 16 Kota Tangerang 15111;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 506/KPU.Kota.015.436421/IX/2013 bertanggal 18 September 2013 memberi kuasa kepada H. Agus Setiawan, S.H., Musyafah Achmad, S.H., Ridwan Kusnandar, S.H., Ichsan Budi Afriyadi, S.H., Mukhtar Latief, S.H.I., dan Mochamad Anggi Bimanes, S.H., selaku advokat dan asisten advokat pada *Law Firm* Asrek & Co, yang beralamat di Jalan Trip. K. Jamaksari Ruko Inti Cinanggung, B-10 Kota Serang, Banten 42118, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon I;

[1.4] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, berkedudukan di Jalan K.H. Sokhari Nomor 42 Cipare, Kota Serang, Provinsi Banten;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 240/KPU-Prov.015/IX/2013 bertanggal 18 September 2013, memberi kuasa kepada H. Agus Setiawan, S.H., Musyafah Achmad, S.H., Ridwan Kusnandar, S.H., Ichsan Budi Afriyadi, S.H., Mukhtar Latief, S.H.I., dan Mochamad Anggi Bimanes, S.H., selaku advokat dan asisten advokat pada *Law Firm* Asrek & Co, yang beralamat di Jalan Trip. K. Jamaksari Ruko Inti Cinanggung, B-10 Kota Serang, Banten 42118, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Termohon II;

[1.5] 1. Nama : H. Arief R. Wismansyah, B.Sc., M.Kes.

Alamat : Jalan Imam Bonjol Gang Teladan I RT.03/RW.04

Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci, Kota

Tangerang, Provinsi Banten

2. Nama : Drs. H. Sachrudin

Alamat : Jalan Panglima Polim Nomor 60 RT.01/RW.04

Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan

Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 September 2013 memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H., Widat, S.H., Mukhlis Muhammad Maududi, S.H.,S.Sos.,** dan **Nurul Anifah, S.H.,** selaku advokat dan konsultan hukum pada **Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP)** *Law Firm,* yang beralamat di Menteng Square Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30 Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-MK/IX/2013, memberi kuasa kepada Sumardi, S.H.,M.H., H. Surya Bagya, S.H.,M.H., Maskur, S.Hi.,M.H., Susilo Wardoyo, S.H., dan Achmad Bustomi, S.H., selaku advokat pada *Law Firm* Sumardi & Partner yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Ruko Modernland Blok CR Nomor 33, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

# [1.6] Mendengar dan membaca laporan Termohon II;

Mendengar dan membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten:

Mendengar dan membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Pengurus Partai Hati Nurani Rakyat;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

### 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PHPU.D-XI/2013 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 bertanggal 1 Oktober 2013, yang amarnya sebagai berikut:

# Mengadili,

# Menyatakan:

# Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II untuk seluruhnya;
- Menolak eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

### **Dalam Pokok Permohonan:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir;

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Mahkamah Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 1 Oktober 2013;

Bahwa terkait dengan perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 1 Oktober 2013, yang amarnya sebagai berikut:

# Mengadili,

### Menyatakan:

# Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU. Kota.015.435421/VII/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

- Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, bertanggal 11 Agustus 2013;
- Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, bertanggal 06 September 2013;
- Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, bertanggal 06 September 2013;
- 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umun Provinsi Banten untuk melakukan:
  - a. verifikasi ulang pengusulan partai politik terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar serta Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto;
  - b. pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi dukungan partai politik dan pemeriksaan kesehatan tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- 7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan;
- [2.2] Menimbang bahwa terhadap verifikasi ulang tersebut, Termohon II (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten) menyampaikan laporan pada persidangan tanggal 7 November 2013 dan telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 21 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 Oktober 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### Konklusi

Bahwa berdasarkan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Ulang Pengusulan Partai Politik terhadap Pasangan Calon DR. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.SI dan

ISKANDAR serta Pasangan Calon Ir. H. AHMAD MARJU KODRI dan Drs. GATOT SUPRIJANTO dan Pemeriksaan Kesehatan terhadap Pasangan Calon Ir. H. AHMAD MARJU KODRI dan Drs. GATOT SUPRIJANTO sesuai dengan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 dan 116/PHPU.D-XI/2013, dapat KPU Provinsi Banten sampaikan konklusi sebagai berikut:

a. Tentang verifikasi ulang pengusulan partai politik terhadap Pasangan Calon Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar serta Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto;

Beberapa hal yang dapat KPU Provinsi Banten laporkan kepada Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan verifikasi ulang pengusulan partai politik terhadap Pasangan Calon Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar serta Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto, adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto mendaftarkan pencalonan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013, sedangkan Pasangan Calon Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR mendaftarkan pencalonan pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013;
- Pada masa pendaftaran, Pasangan Calon Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR tidak cukup dukungan/pengusungan partai politik dalam rangka pencalonan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Periode Tahun 2013 – 2018;
- 3. Tetapi kemudian pada masa perbaikan, Pasangan Calon Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR menyerahkan penambahan syarat dukungan dari Partai Hanura yang mempunyai 2 (dua) kursi anggota DPRD Kota Tangerang, yang sebelumnya Partai Hanura telah menjadi pendukung/pengusung Pasangan Calon AHMAD MARJU KODRI dan GATOT SUPRIJANTO:
- 4. Bahwa KPU Provinsi Banten terikat oleh ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, setidak-tidaknya pasal-pasal sebagai berikut:
  - a. Pasal 9 ayat (3): Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani

kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan;

b. Pasal 61 : KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota meminta keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain kepada dewan pimpinan partai politik setempat mengenai kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah, sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon;

#### c. **Pasal 66**

(2) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memberi dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah, sebagaimana dimaksud Pasal 64;

# d. Pasal 70

- (1) KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota menolak pendaftaran bakal pasangan calon, yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memenuhi jumlah kursi paling sedikit 15 % (lima belas persen) atau jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas persen);
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai pengembalian berkas pendaftaran bakal pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran yang telah ditentukan;

# e. Pasal 95 ayat (2)

g. partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf f, tidak dapat memindahkan dukungannya kepada bakal pasangan calon lain yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon;

5. Berdasarkan hasil verifikasi ulang yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten terhadap dukungan partai politik pada masa pendaftaran yang mendukung/mengusung Pasangan Calon AHMAD MARJU KODRI dan GATOT SUPRIJANTO memiliki jumlah dukungan 19 (sembilan belas) partai politik dengan jumlah suara sah sebesar 106.399 (seratus enam ribu tigaratus sembilan puluh sembilan) suara melebihi minimal persyaratan suara sah sebagai persyaratan pendaftaran bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 60/KPTS/KPU-kota.Tng/015.436421/V/2013 tanggal 23 Mei 2013;

# Tentang pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto;

Beberapa hal yang dapat KPU Provinsi Banten laporkan kepada Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan *pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto,* adalah sebagai berikut:

- Pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2013 oleh Tim Dokter IDI Tangerang;
- 2. Hasil pemeriksaan kesehatan diserahkan Tim Dokter IDI Tangerang tanggal 14 Oktober 2013;
- 3. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan terhadap Pasangan Calon Ir. H. AHMAD MARJU KODRI Drs. GATOT SUPRIJANTO Model BB5-KWK KPU yang ditandatangani Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus Dr. I Gede Rai Kosa, SpPD. Dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang.

#### Permohonan

Demikianlah Laporan berkenaan dengan Pelaksanaan Verifikasi Ulang Pengusulan Partai Politik Terhadap Pasangan Calon DR. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.SI dan ISKANDAR serta Pasangan Calon Ir. H. AHMAD MARJU KODRI dan Drs. GATOT SUPRIJANTO dan Pemeriksaan Kesehatan Terhadap Pasangan Calon Ir. H. AHMAD MARJU KODRI dan Drs. GATOT SUPRIJANTO yang dapat

KPU Provinsi Banten sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat dijadikan pertimbangan dalam mengadili, memeriksa, dan memutuskan Perkara Register Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 dan 116/PHPU.D-XI/2013 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;

KPU Provinsi Banten tetap berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga Pengawal Konstitusi yang selalu mengedepankan keadilan substantif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di Mahkamah Konstitusi:

Namun demikian, berkenaan dengan perkara *a quo* - terlepas dari ada ataupun tidak adanya pengurangan terhadap jumlah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, KPU Provinsi Banten bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutuskan perkara *a quo* sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh KPU Provinsi Banten sebagaimana telah disampaikan kepada Mahkamah baik dalam Jawaban Termohon maupun Kesimpulan Termohon pada sidang-sidang terdahulu;

Adapun hal tersebut KPU Provinsi Banten sampaikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Fakta bahwa perolehan suara terbanyak diperoleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Arief R. Wirsmansyah dan Sachrudin dengan selisih yang cukup signifikan dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 lainnya;
- 2. Fakta bahwa jikalaupun terdapat sejumlah suara sah yang "tidak bertuan" sebagai akibat dari adanya pengurangan jumlah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tersebut ditambahkan kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh pasangan calon secara merata (terkecuali kepada Pasangan Calon atas nama Arief R. Wirsmansyah dan Sachrudin), maka jumlahnya tetap tidak akan melampaui perolehan suara Pasangan Calon atas nama Arief R. Wirsmansyah dan Sachrudin;

- 3. Fakta bahwa jika Mahkamah memutuskan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di sebagian maupun di seluruh wilayah Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, maka akibat hukum baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang harus diterima dan dirasakan warga Kota Tangerang antara lain adalah:
  - a. Menyangkut ketertiban umum dan keamanan di Kota Tangerang;
  - b. Permasalahan anggaran penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
  - c. Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tangerang yang *notabene* saat ini Jabatan Walikota Tangerang dijabat oleh Plt Walikota Tangerang yang akan segera berakhir masa jabatannya pada November 2013;
  - d. Terganggunya Penyelenggaran Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014;
  - e. Terganggunya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014; Oleh karena itu, KPU Provinsi Banten bermohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:
    - Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Oleh KPU Kota Tangerang tertanggal 6 September 2013;
    - Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tanggal 6 September 2013;
    - Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 6 September 2013;
    - 4. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

# A. Catatan Kronologi Verifikasi Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Periode 2013 -2018

1. Syarat dukungan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang berdasarkan SK KPU Kota Tangerang Nomor 60/KPTS/KPU-kota.Tng/015.436421/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 adalah 8 kursi atau berdasarkan perolehan suara minimal 104.910 suara (sama dengan 15%).

- Tanggal penetapan berdasarkan Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Tahun 2013, SK Nomor 27/KPTS/KPU-Kota.Tng/015.436421/III/2013 tanggal 30 Mei 2013;
  - Pencalonan dari Parpol dan gabungan partai politik, pengumuman pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang tanggal 29 – 30 Mei 2013,
  - Pengambilan formulir tanggal 31 Mei 1 Juni 2013,
  - Pendaftaran pasangan calon tanggal 02 Juni 08 Juni 2013,
  - Penelitian tanggal 09 15 Juni 2013,
  - Pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi kepada partai politik/gabungan partai politik tanggal 09 15 Juni 2013,
  - Melengkapi/memperbaiki soal pencalonan/syarat calon tanggal mengajukan calon Baru dari Partai politik/gabungan partai politik tanggal 16 – 22 Juni 2013.
- 3. Pada hari Kamis tanggal **06 Juni 2013** Pasangan **Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto** mendaftarkan pencalonan, berdasarkan;
  - Surat pada Model B dan surat penjelasan Model B KWK KPU surat pencalonan Nomor 001/HANURA-KPNP/VI/2013 dengan dukungan 25 partai politik,
  - Satu partai politik memiliki 2 (dua) kursi atas nama Partai Hanura selebihnya gabungan partai non parlemen,
  - Partai Hanura dengan 2 kursi memiliki 35.591 suara. Total jumlah suara yang diajukan oleh pasangan Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto adalah **128.131** suara.
- Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 Pasangan Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR mendaftarkan pencalonan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013, berdasarkan;

Dokumen Model B KWK KPU surat pencalonan tertanggal 8 juni 2013 dengan dukungan 3 partai politik yakni:

- 1. PPP memperoleh 5 kursi
- 2. Gerindra memperoleh 5 kursi
- 3. PKNU memperoleh 1 kursi

# B. Pasangan Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar

- Mendaftar hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013, dengan surat pencalonan Nomor 001/005-Kualisi/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 dengan partai pendukung/ pengusung yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik Tingkat Kota Tangerang, yaitu:
  - 1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan jumlah 5 kursi, yang ditandatangani oleh Iskandar, S.Ag (Ketua) dan H. Dedi Candra Wijaya (Sekretaris);
  - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan jumlah 5 kursi, yang tandatangani oleh Sofyan Ahmad (Ketua) dan Sadimin Supriyadi (Sekretaris);
  - 3) PKNU dengan jumlah 1 kursi, yang tandatangani oleh Hendra Gunawan (Ketua) dan Dian M (Sekretaris);
  - Jumlah kesuluruhan dukungan partai politik sebanyak 11 kursi atau 22% dukungan jumlah kursi Partai Politik di DPRD Kota Tangerang;
- 2. Namun berdasarkan pengecekan dokumen bahwa Partai Gerindra telah menjadi pengusung pasangan Arief R. Wirsmansyah dan Syahrudin yang mendaftar lebih dahulu pada tanggal 6 Juni 2013 dengan surat pencalonan Nomor 001/ARIEF-SACHRUDIN/VI/2013 tanggal 6 Juni 2013, di mana dalam surat pencalonan tersebut yang menandatangani dari Partai Gerindra adalah Nurhadi, ST sebagai Ketua dan Turidi Susanto sebagai Sekretaris, sesuai surat rekomendasi dari DPP Gerindra Nomor 05-0329/PILKADA/DPP-GERINDRA/2013 tertanggal 22 Mei 2013 Hal Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah Kota Tangerang Periode 2013 2018 kepada DPC Gerindra Kota Tangerang (sesuai Surat Keputusan Nomor 05-0431/Kpts/DPP-GERINDRA/2011 tertaggal 10 Mei 2011).
- 3. Hasil Klarifikasi KPU Kota Tangerang yang dituangkan dalam Surat Nomor 04-0146/DPP-GERINDRA/2013 tertanggal 11 Juni 2013 perihal Klarifikasi Kepengurusan DPC Partai Gerindra Kota Tangerang, bahwa kepengurusan DPC Gerindra Kota Tangerang berdasarkan Surat Keputusan DPP Nomor 08-1183/Kpts/DPP-GERINDRA/2008 tertanggal 18 Agustus 2008 di bawah kepemimpinan sdr. Sofyan Ahmad, SH sebagai Ketua dinyatakan sudah tidak berlaku lagi karena Surat Keputusan tersebut telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Nomor 11-1102/Kpts/DPP-GERINDRA/2008 tertanggal 27

- November 2008, di bawah kepemimpinan Sdr. Dr. Amril Gobel, MBA sebagai Ketua.
- 4. Surat Keputusan Nomor 11-1102/Kpts/DPP-GERINDRA/2008 tertanggal 27 November 2008, di bawah kepemimpinan Sdr. Dr. Amril Gobel, MBA sebagai Ketua sudah tidak berlaku, dicabut dengan Surat Keputusan Nomor 05-0431/Kpts/DPP-GERINDRA/2011 tertaggal 10 Mei 2011, bahwa Sdr. Nurhadi, ST sebagai Ketua, Ir. Turidi Susanto sebagai Sekretaris, dan Sdr. Imam Buchori sebagai Bendahara DPC Partai Gerindra Kota Tangerang.
- 5. Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa pasangan Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR hanya didukung oleh 2 (dua) Partai Politik dengan jumlah 6 kursi atau 12% dukungan jumlah kursi Partai Politik di DPRD Kota Tangerang, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan jumlah 5 kursi; dan
  - 2) PKNU dengan jumlah 1 kursi.

Sehingga pasangan **Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR** tidak cukup dukungan/pengusungan partai politik dalam rangka pencalonan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Periode Tahun 2013 – 2018. Berdasarkan SK KPU Kota Tangerang Nomor 60/KPTS/KPU-Kota.Tng/015.436421/V/2013 tanggal 23 Mei 2013;

Pada masa perbaikan, Pasangan **Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR** menyerahkan penambahan syarat dukungan dari Partai Hanura yang mempunyai dua kursi anggota DPRD Kota Tangerang, yang sebelumnya Partai Hanura telah menjadi pendukung/pengusung Pasangan **Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto.** 

DPP Partai HANURA menerbitkan Surat Keputusan Nomor SKEP/B/683/DPP-HANURA/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 tentang Pengesahan Nama Calon Walikota Tangerang – Provinsi Banten Periode 2013 – 2018 kepada Pasangan Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR, sesuai surat Nomor SKEP/B/671/DPP-HANURA/VI/2013 tertanggal 14 Mei 2013 tentang Pengesahan Nama Calon Walikota Tangerang – Provinsi Banten Periode 2013 – 2018 atas nama Ir. H. AHMAD MARJU KODRI.

Hasil klarifikasi KPU Kota Tangerang kepada DPP Partai HANURA sesuai Surat Nomor A/199/DPP-HANURA/VII/2013 tertanggal 13 Juli 2013 perihal

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Sesuai dengan surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor SKEP/B/671/DPP-HANURA/V/2013 yang menetapkan dukungan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang kepada Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto, dan telah didaftarkan oleh DPC Partai HANURA Kota Tangerang Kepada KPU Kota Tangerang dalam tenggat waktu masa pendaftaran;
- Dalam proses perbaikan melengkapi berkas pasangan calon, sebelum berakhirnya masa perbaikan yang telah ditentukan. DPC Partai HANURA Kota Tangerang dalam Surat Nomor 188/PEM/III/HANURA/A-C/VI/2013 tertanggal 17 Juni 2013 bahwa pasangan atas nama kepada Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto tidak memenuhi syarat, dan mengajukan pasangan calon lain sebagai pengganti yang diterima oleh DPP Partai HANURA sehingga diterbitkannya Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor SKEP/B/683/DPP-HANURA/VI/2013 2013 tertanggal 18 Juni 2013 tentang Pengesahan Nama Calon Walikota Tangerang Provinsi Banten Periode 2013 2018 kepada Pasangan Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR;
- DPP Partai HANURA meminta kepada KPU Kota Tangerang untuk menetapkan pasangan calon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan tata cara penetapan pasangan calon dalam Pilkada.

# C. Partai Politik Yang Mengajukan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Ir. H. Ahmad Marju Kodri - Drs. Gatot Suprijanto

- Partai Hati Nurani Rakyat, Surat Keputusan Hanura Nomor 004/II/Kep/HANURA/A-C/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kota Tangerang Masa Bakti 2010 – 2015,
- Partai Karya Peduli Bangsa, Surat Keputusan Nomor 26/DPP-PKB/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pertimbangan Partai Karya Peduli Bangsa Kota Tangerang Masa Bakti 2013-2016,

- 3. **Partai Peduli Rakyat Nasional,** Surat Keputusan Nomor 007/DK/DPW-PPRN/V/2011 tanggal 09 juni 21012 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kota Tangerang Provinsi Banten,
- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Surat Keputusan Nomor 06A/SKEP/DPP-PKP IND/BTN/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang susunan Personalia Dewan Pimpinan Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPK PKP Indonesia) Kota Tangerang Masa Bakti 2013 - 2015,
- Partai Bintang Reformasi, Surat Keputusan Nomor 004/Kpts/DPW-PBR/Batn/VII/2011 tanggal 2i Juli 2011 tetang Pengesahan Susunan Pengurus Hasil Restrukturisasi Dewan pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kota Tangerang Periode 2008 2013,
- Partai Damai Sejahtera, Surat Keputusan Nomor 007/SK-DPW PDS BTN/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Pengangkatan Pengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kota Tangerang Provinsi Banten,
- Barisan Nasional Surat Keputusan Nomor 60.21.03/REV.I/SKEP/DPP.P. BARNAS/DPC/2008 tanggal 6 Agustus 2008 tentang Pengesahan Penyempurnaan surat Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Barisan Nasional Kota Tangerang Provinsi Banten Masa Bakti 2013 – 2018,
- 8. **PMB** Surat Keputusan Nomor 73.23.08 Rev.I/DPP-P.PMB/VIII/2008 tanggal 08 Agustus 2013 tentang Penegasan pimpinan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kota Tangerang Provinsi Banten, Masa Bakti 2007 2012
- Partai Pelopor, Surat Keputusan Nomor 037.G/SK DPP/W.1.29.05/PP/III-12 tanggal 05 Maret 2012 tentang Struktur dan Personalia Dewan Pertimbangan Cabang dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kota Tangerang Provinsi Banten Masa Bakti 5 Maret 2012 6 Maret 2017,
- Patriot, Surat Keputusan Nomor 009/SK/DPN-Patriot/BTN/III/2012 tentang Susunan dan Komposisi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kota Tangerang tanggal 5 Maret 2013,

- 11. PNBKI, Surat Keputusan Nomor 1790/B/DPP/PNBK Ind/KPTS/IX/2012 tanggal 06 September 2013 tentang Pengesahan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Kota Tangerang Provinsi Banten Periode 2011-2014
- 12. PKDI,Surat Keputusan Nomor 011.005/DPP/PKDI/TUS/06/2011 tanggal 15 Juni 2011 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kota Tangerang Provinsi Banten Periode 2008-2013
- 13. Partai Republik Nusantara, Surat Keputusan Nomor 005/DPD/REP/SK/VIII/ tanggal 11 Agustus 2008 tentang Susunan Pengurus Partai Republik Nusantara Dewan Presidium Cabang Kota Tangerang
- 14. Partai Kedaulatan, Surat Keputusan Nomor 27.A.7.1/SK/DPP/DPC/IV/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kota Tangerang
- 15. PNI Marhaenisme, Surat Keputusan Nomor 016005-B/JB-13/DPP PNI-M/XII/2013 tanggal 7 Desember 2012 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (DPC PNI Marhaenisme) Kota Tangerang Provinsi Banten Periode 2013-2017
- 16. Partai Serikat Indonesia, Surat Keputusan Nomor 003P4/SK/DPP/C-36/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 tentang Perubahan Struktur Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Sarikat Indonesia Masa Bhakti 2008-2013
- 17. PKPP, Surat Keputusan Nomor 16/SKEP/BPP.PAKAR PANGAN/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012 tentang Perubahan Pengurus Dewan Pimpinan Kota Partai Karya Perjuangan (DPK-PAKAR PANGAN) Kota Tangerang Periode 2012-2014
- 18. PDK, Surat Keputusan Nomor PDK/SK/PP-SJ/349/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kota Partai Demokrasi Kebangsaan Kota Tangerang Provinsi Banten Masa Bhakti 2012-2015
- 19. **Partai Penegak Demokrasi Indonesia,** Surat Keputusan Nomor 2513/SK/DPP/PPDI/V/2013 tentang Struktur Komposisi dan Personalia

- Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kota Tangerang Masa Bhakti 2013-2018.
- 20. Partai Pemuda Indonesia, (Tidak ada berkas)
- 21. Partai Bulan Bintang, (Tidak ada berkas)
- 22. **PPPI**, SK Nomor 010/A/IN/16/SK-DPD-PPPI/BTN/IX/2012 tentang Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Cabang PPPI Kota Tangerang
- 23. Partai Merdeka (Tidak ada berkas)
- 24. PPIB, SK Nomor 05/04/PPIB/SK-PENGURUS/2008/REV.01 tanggal 25 September 2008 tentang Pembentukan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kota Tangerang
- 25. PDP, SK Nomor 2274/II.06/SKEP/PKN-PDP/IX/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Pimpinan Kolektif dan Pelaksana Harian PDP Kota Tangerang Masa Bhakti 2012-2015
- 26. **Partai Buruh**, SK Nomor 02/S-KEP/DPD/PARTAI BURUH/BTN/IV/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kota Tangerang
- 27. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah, SK Nomor KEP.05/DPW.PPNU/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Kota Tangerang Periode 2011-2016
- 28. **Partai Indonesia Sejahtera** (Tidak ada berkas)

# D. Surat Dukungan Partai Politik Terhadap Ir. H. Ahmad Marju Kodri - Drs. Gatot Suprijanto:

- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor SKEP/B/671/DPP-HANURA/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pengesahan Nama Calon Walikota Tangerang Provinsi Banten Periode 2013-2018
- Surat Pernyataan Pengusungan yang ditandatangani ketua dan Sekretaris Partai Republik Nusantara
- Surat Pernyataan mengusung dari PNI-M Nomor /PNI-M/DPC/I/2013 tanggal 15 Januari 2013
- Surat Pernyataan mengusung dari PAKAR PANGAN Kepada AMK tanggal 15 Januari 2013 Nomor /DPK-TGR/I/2013

 Surat DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 09/DPC/PPDI/III/2013 tanggal Maret 2013

# E. Temuan Permasalahan Dukungan Partai Terhadap Ir. H. Ahmad Marju Kodri - Drs. Gatot Suprijanto (Nomor 4):

#### 1. PPIB

SK nomor 05/04/PPIB/SK-PENGURUS/2008 Rev;01 tanggal 25 September 2008 yang menetapkan ketua Dewan Pimpinan Daerah An. Ec. Ari Wibowo, Sekretaris Sasmito Dwijo Priyo, SE ternyata sama dengan lampiran Surat Keputusan tersebut untuk Ketua dan Sekretaris An. Ec. Ari Wibowo, Sekretaris Sasmito Dwijo Priyo, SE ditetapkan tanggal 25 September 2008.

Pendaftaran dibuka pada tanggal 2 s.d 8 Juni 2013. Bahwa PPIB berdasarkan data di Kementrian Hukum dan HAM tahun 2012 telah berganti nama menjadi PKBIB sehingga pengusungan/pencalonan juga harus menggunakan kepengurusan PKBIB.

### 2. PDP

Yang menandatangani pencalonan Model B1 Pengurus dari Provinsi Banten, yang seharusnya pengurus di Kota Tangerang yaitu Sunarto (Ketua), dan Sestinawati (Sekretaris)

### 3. PKDI

Bahwa SK Kepengurusan tingkat Kota Tangerang sudah berubah dengan nama Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, namun AD/ART masih atas nama Partai Kasih Demokrasi Indonesia. Di samping itu stempel sudah Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia.

# Jumlah Dukungan Partai Dan Jumlah Suara

Pasangan Ir. H. AHMAD MARJU KODRI - Drs. GATOT SUPRIJANTO menyampaikan surat pendaftaran pasangan calon pada tanggal 6 Juni 2013 dengan surat pencalonan Model B Nomor B.KWK.KPU Nomor 001/HANURA.KPNP/VI/2013. Partai pendukung/pengusung berjumlah 25 partai politik, dengan total suara 128.131 (data versi AMK-GATOT).

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Suara Versi Amk - Gatot	Jumlah Suara Berdasar Sk.Kpu Kota Tangerang
1	Partai Hanura	2	35.591	35.591
2	PKPB	0	6.244	6.902
3	PPRN	0	3.167	3.167
4	PKPI	0	5.320	5.320
5	PBR	0	11.582	11.582
6	Partai Damai Sejahtera	0	16.486	15.486
7	Partai Barisan Nasional	0	2.346	2.346
8	Partai Matahari Bangsa	0	1.269	1.323
9	Partai Pelopor	0	1.346	1.346
10	Partai Patriot	0	8.229	8.229
11	PNBKI	0	2.306	2.306
12	Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia	0	2.329	2.329
13	Partai Republik Nusantara	0	1.771	3.675
14	Partai Kedaulatan	0	676	676
15	PNI-M	0	2.376	2.376
16	Partai Serikat Indonesia	0	661	610
17	Partai Karya Perjuangan	0	2.427	2.517
18	Partai Demokrasi Kebangsaan	0	4.825	4.825
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	0	885	885
20	Partai Pemuda Indonesia	0	2.523	2.523
21	Partai Bulan Bintang	0	10.535	10.353

22	Partai Pengusaha Pekerja			
22	Indonesia	0	1.810	1.810
	Dowto: Mondolco	0	447	447
23	Partai Merdeka	U	117	117
24	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0	551	501
25	Partai Demokrasi Pembaruan	0	2.759	2.759
JUM	JUMLAH		128.131	129.554
UUI	JOINLAH		120.101	123.004

# Keterangan: \*

SK KPU Kota Tangerang Nomor 60/KPTS/KPU-kota.Tng/015.436421/V/2013 tanggal 23 Mei 2013

Setelah dilakukan verifikasi ulang terhadap dukungan Partai Politik pada masa pendaftaran dari tanggal 2 – 8 Juni 2013 ditemukan sebagai berikut;

- 1. PKPB SK Kepengurusannya tidak sah.
- 2. Partai Pemuda Indonesia tidak ada tanda tangan pengusung.
- 3. Partai Bulan Bintang tidak ada tanda tangan pengusung.
- 4. Partai Merdeka tidak ada tanda tangan pengusung.
- 5. Partai Demokrasi Pembaruan yang menandatangani dukungan tidak sesuai dengan SK Susunan Kepengurusan Tingkat Kota
- 6. PPIB nama kepengurusan tidak sesuai AD/ART di Kementrian Hukum dan HAM

Berdasarkan hasil verifikasi KPU Provinsi Banten terhadap Pasangan **Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto** ditemukan fakta pada masa pendaftaran didukung oleh 19 partai politik dengan perincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Suara Versi AMK - GATOT	Jumlah suara berdasar Sk. KPU Kota Tangerang*
1	Partai Hanura	2	35.591	35.591
2	PPRN	0	3.167	3.167
3	PKPI	0	5.320	5.320

4	PBR	0	11.582	11.582
5	Partai Damai Sejahtera	0	16.486	15.486
6	Partai Barisan Nasional	0	2.346	2.346
7	Partai Matahari Bangsa	0	1.269	1.323
8	Partai Pelopor	0	1.346	1.346
9	Partai Patriot	0	8.229	8.229
10	PNBKI	0	2.306	2.306
11	Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia	0	2.329	2.329
12	Partai Republik Nusantara	0	1.771	3.675
13	Partai Kedaulatan	0	676	676
14	PNI-M	0	2.376	2.376
15	Partai Serikat Indonesia	0	661	610
16	PARTAI KARYA PERJUANGAN	0	2.427	2.517
17	Partai Demokrasi Kebangsaan	0	4.825	4.825
18	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	0	885	885
19	Partai Pengusaha Pekerja Indonesia	0	1.810	1.810
	Jumlah		105.402	106.399

Keterangan: \*

SK KPU Kota Tangerang Nomor 60/KPTS/KPU-kota.Tng/015.436421/V/2013 tanggal 23 Mei 2013

Namun setelah di verifikasi Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) yang menadatangani dukungan pencalonan tidak sesuai dengan SK Kepengurusan Partai nomor 227/II.06/Skep/PKN-PDP/IX/2012 tanggal 25 September 2012. Yang menandatangani pencalonan Model B1 Pengurus dari Provinsi Banten, yang seharusnya pengurus di Kota Tangerang yaitu Sunarto (Ketua), dan Sestinawati (Sekretaris). Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (1), Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 65 ayat (3);

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap PKPB sesuai surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa Nomor SKEP – 74/DPP-PKPB/VI/2013 tentang Persetujuan Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Walikota Tangerang Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 dengan menetapkan Sdr. H. Abdul Syukur sebagai Calon Walikota dan Sdr. H. Hilmi Fuad sebagai Calon Wakil Walikota Tangerang yang dicalonkan oleh PKPB dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 sebagaiman telah diusulkan oleh DPD PKPB Kota Tangerang.

Bahwa pernyataan dukungan Nomor 017/PKPB-Kota.TNG/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dengan ditandatangani oleh Agus Mulyana sebagi Ketua dan Temmy Setiawan,SE sebagai Sekretaris DPD PKPB Kota Tangerang menyatakan dukungan kepada Sdr. H. Abdul Syukur sebagai Calon Walikota Tangerang dan Sdr. H. Hilmi Fuad sebagai Calon Wakil Walikota Tangerang Periode Tahun 2013-2018.

Bahwa Dewan Pimpinan Pusat PKPB dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa Nomor SKEP-64/DPP-PKPB/V/2013 tentang Penetapan dan pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Karya Peduli Bangsa Kota Tangerang Masa Bakti 2013 – 2016 yang menyatakan bahwa Ketua Agus Mulyana, ST dan Sekretaris Temi Setiawan, SE

Berdasarkan verifikasi ulang yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten terhadap dukungan partai politik pada masa pendaftaran yang mendukung/mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto memiiki jumlah dukungan 19 partai politik dengan jumlah suara sah sebesar 106.399 suara melebihi minimal persyaratan suara sah sebagai persyaratan pendaftaran bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang periode 2013-2018 berdasarkan SK KPU Kota Tangerang Nomor 60/KPTS/KPU-kota.Tng/015.436421/ V/2013 tanggal 23 Mei 2013;

Di masa perbaikan ada penambahan dukungan partai baru (Partai Buruh dan Partai Persatuan Nadlatul Umah Indonesia) namun tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 95 ayat (2) huruf a. "partai politik dan/atau gabungan partai politik dilarang menambah dukungan partai politik yang

tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran.

# Pemeriksaan Kesehatan Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. H. Ahmad Marju Kodri - Drs. Gatot Suprijanto

- Pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2013 oleh tim Dokter IDI Tangerang.
- Hasil pemeriksaan kesehatan diserahkan tim Dokter IDI Tangerang tanggal 14
   Oktober 2013
- Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan calon nomor urut 4 Ir. H. AHMAD MARJU KODRI - Drs. GATOT SUPRIJANTO Model BB5-KWK KPU yang ditandatangani Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus Dr. I Gede Rai Kosa, SpPD. Dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang. (dokumen hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani terlampir);

Selain menyampaikan laporan, Termohon juga melampirkan dokumen yaitu sebagai berikut:

- Keputusan Komisi Pemiliha Umum Kota Tangerang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/II/2013 tetang Tahapan, Program, Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
- Keputusan Komisi Pemiliha Umum Kota Tangerang Nomor 02/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/II/2013 tetang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Penyelenggaraan Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Periode 2013 – 2018;
- Keputusan Komisi Pemiliha Umum Kota Tangerang Nomor 27/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/III/2013 tetang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/II/2013 tentang Tahapan, Program, Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wald! Walikota Tangerang Tahun 2013;
- Keputusan Komisi Pemiliha Umum Kota Tangerang Nomor 60/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/V/2013 tetang Penetapan prosentase Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai

- Politik Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wald! Walikota Tangerang Tahun 2013;
- Keputusan Komisi Pemiliha Umum Kota Tangerang Nomor 080A/Kpts/KPU-Kota-Tng/015.436421/VIII/2013 tetang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/II/2013 tentang Tahapan, Program, Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
- 6. Tanda Terima Pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Dr. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, S.Ag;
- 7. Surat Pencalonan Nomor ... Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota atas narna Dr. Harry Mulya Zein, IVI.Si clan Iskandar, S.Ag;
- 8. Surat keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Banten Nomor 032/SK/DPW-PPP/027/VI/2013;
- Tanda Terirna Penyerahan perbaikan Kelengkapan administrasi Pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wald' Walikota atas nama Dr. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, S.Ag;
- 10. Surat Pencalonan Nomor 001/005-Koalisi/VI/2013 Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Dr. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, S.Ag;
- 11. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nornor 08-1183/kpts/DPP-GERINDRA/2008 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Tangerang Provinsi Banten;
- 12. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 05-0431/kpts/DPP-GERINDRA/2011 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 09-254/PILKADA/DPP-GERINDRA/2012 perihal Bakal Calon Kepala Daerah Kota Tangerang Periode 2013 – 2118;
- 14. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nadlatul Nomor SK-508/DPP-01/VIII/2012 tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kota Tangerang Masa Khidmat 2011 2016;

- 15. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nadlatul Nomor SK-810/DPP-01/V/2013 tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kota Tangerang Masa Khidmat 2011 2016;
- 16. Surat Rekomendasi Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nadlatul Nomor A-211/DPP-03/111/2013 perihal Rekomendasi dan Dukungan Calon Walikota Tangerang;
- 17. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Banten Nomor 010/SK/DPW-PPP/027/XII/2011 tentang Rekomendasi Calon Walikota Tangerang Masa Bakti 2013 2018;
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Banten Nomor 030/SK/DPW-PPP/027/V/2013 tentang Rekomendasi Calon Walikota Tangerang Masa Bakti 2013 – 2018;
- 19. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Banten Nomor 032/SK/DPW-PPP/027/VI/2013 tentang Rekomendasi Calon Walikota Tangerang Sebagai Perubahan Atas Suarat Keputusan Dewan Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Banten Nomor 030/SK/DPW¬PPP/027/V/2013 tentang Rekomendasi Calon Walikota Tangerang Masa Bakti 2013 – 2018;
- 20. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor SKEP/B/683/DPP-HANURA/VI/2013 tentang Pengesahan Nama Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Provinsi Banten Periode 2013 2018;
- 21. Surat Dewan Pimpinan Pusat Part- ai Hati Nurani Rakyat Nomor A/199/DPP-HANURA/VII/2013 perihal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang;
- 22. Surat Dewan Pimpinan Cabang Kota Tangerang Partai Hati Nurani Rakyat Nomor 191/III/DPC-HANURA/A-C/VII/2013 perihal Klarifikasi Atas Pengajuan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang yang diusung oleh DPC Partai Hanura Kota Tangerang;
- 23. Tanda Terima Pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Ir. I H.Ahmad Marju kodri dan Drs. Gatot Suprijanto;
- 24. Surat Pencalonan Nomor 001/HANURA-PNP/VI/2013 Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Ir. H.Ahmad Marju kodri dan Drs. Gatot Suprijanto;

- 25. Tanda Terima Penyerahan perbaikan Kelengkapan administrasi Pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Ir. H.Ahmad Marju kodri dan Drs. Gatot Suprijanto;
- 26. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa Nomor SKEP-74/DPP-PKPB/VI/2013 tentang Persetujuan Pencalonan Kepala Daerah Walikota Tangerang dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013:
- 27. Surat Keputusan Komisi Pemiliha Umum Provinsi Banten Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 12013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
- 28. Surat Keputusan Komisi Pemiliha Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
- 29. Surat Ikatan Dokter Indonesia Cabang Tangerang Nomor 336/IDI-TNG/10/2013 perihal Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tangerang Periode 2013 – 2018;
- 30. Model BB3 KWK KPU Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Kesehatan Jasmani dan Rohani atas nama Ir. H. Ahmad Marju Kodri;
- 31. Model BB3 KWK KPU Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Kesehatan Jasmani dan Rohani atas nama Drs. Gatot Suprijanto;
- 32. Resume Pemeriksaan Kesehatan Bari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Tangerang Nomor 337/IDI.TNG/10/2013 atas nama Ir. H. Ahmad Marju Kodri;
- 33. Resume Pemeriksaan Kesehatan dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Tangerang Nomor 338/IDI.TNG/10/2013 atas nama Drs. Gatot Suprijanto;
- [2.3] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten menyampaikan laporan pada persidangan tanggal 7 November 2013 dan telah mneyampaikan laporan tertulis bertanggal 6 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 7 November 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan pokok perkara Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, dan Badan Pengawas Pemilihan

- Umum, untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi dukungan partai politik dan pemeriksaan kesehatan tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan pokok perkara a quo juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan tersebut dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan tersebut diucapkan;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi atas pokok perkara a quo diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka pada hari Selasa, 1 Oktober 2013, sehingga Bawaslu Provinsi Banten harus menyelesaikan tugas pengawasan tersebut dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat tanggal 22 Oktober 2013.
- 4. Bahwa Panwaslu Kota Tangerang pada tanggal 22 Oktober 2013 melalui surat nomor 01/98/PANWASLU-KOTA.TNG/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 telah menyerahkan surat kepada Mahkamah Konstitusi yang berisi laporan hasil pengawasan sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan pokok perkara *a quo*.
- 5. Bahwa dalam menjalankan amar Putusan MK dalam pokok perkara *a quo*, Bawaslu Provinsi Banten melakukan pengawasan dengan beberapa metode, yakni koordinasi, pengawasan melekat, dan audit.
- 6. Bahwa dalam menjalankan pengawasan atas amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Bawaslu Provinsi Banten telah melaksanakan beberapa rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dengan perincian sebagai berikut:
  - a) Bawaslu Provinsi Banten setelah keluarnya Putusan MK dalam pokok perkara a quo (tanggal 1 Oktober 2013 sore) telah meminta kepada Panwaslu Kota Tangerang untuk secepatnya melaporkan hasil-hasil sidang PHPU, dan Panwaslu Kota Tangerang telah menyampaikan laporkannya secara lisan kepada Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 2 Oktober 2013.
  - b) Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 4 Oktober 2013 bertempat di Hotel Le Dian, Serang, telah melakukan rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Banten dan Panwaslu Kota Tangerang terkait tahapan dan jadwal pelaksanaan proses verifikasi ulang dan pemeriksaan kesehatan. (Mohon

tidak dipahami bahwa rapat koordinasi tersebut sengaja dilakukan di hotel mewah, namun hanya karena kebetulan bahwa pada hari yang sama KPU Provinsi Banten sedang menyelenggarakan acara di hotel tersebut). Tahapan dan jadwal pelaksanaan Putusan MK yang disusun oleh KPU Provinsi Banten tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 13 /BA/X/2013 pada tanggal 2 Oktober 2013.

- c) Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 21 Oktober 2013 pagi bertempat di Panwaslu Kota Tangerang telah melakukan rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Banten dan Panwaslu Kota Tangerang terkait hasil verifikasi ulang yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten atas pengusulan partai politik terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar serta Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto; serta hasil pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto;
- 7. Bahwa Panwaslu Kota Tangerang telah melakukan pengawasan atas proses verifikasi ulang dan pemeriksaan kesehatan tersebut secara melekat, yakni senantiasa hadir pada saat KPU Provinsi Banten melakukan proses verifikasi ulang di kantor KPU Kota Tangerang pada tanggal 10, 12, 13, 16, dan 18 Oktober 2013 serta hadir ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim Dokter IDI Tangerang pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013.
- 8. Bahwa Panwaslu Kota Tangerang telah melakukan pengawasan atas proses verifikasi ulang yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten dengan melakukan audit keterpenuhan syarat atas pengusulan partai politik terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar serta Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto.
- 9. Dari hasil pengawasan secara melekat dan audit atas proses verifikasi ulang dan pemeriksaan kesehatan tersebut, hasil-hasilnya yang dapat kami laporkan adalah sebagai berikut:
  - A. Audit atas pengusulan partai politik terhadap pasangan calon nomor urut 1, Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar.
    - Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H.M. Harry Mulya Zein,
       M.Si dan Iskandar, didaftarkan ke KPU Kota Tangerang pada tanggal

8 Juni 2013 pukul 23.30 WIB, dengan surat pencalonan Nomor 001/005-Koalisi/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013. Berdasarkan dokumen Model B KWK KPU, surat pencalonan tersebut tertanggal 8 Juni 2013 dengan dukungan 3 partai politik yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik tingkat Kota Tangerang, yaitu:

N o	Nama Partai	Pengurus Partai	SK Pengurus Partai	SK Pengusun gan	Jml Kursi
1	2	3	4	5	6
1	Gerindra	Ketua : Sofyan Ahmad Sekre : Sadimin Supriyadi	Nomor 08- 1183/Kpts/DP P- GERINDRA/ 2008	Nomor 254/PILKA DA/DPP- GERINDR A/2012, bertanggal 12 september 2012	5
2	PPP	Ketua : Iskandar Sekre : Dedi Candra Wijaya	Nomor 010/SK/DPW - PPP/027/XII/ 2011, bertanggal 09 Desember 2011	Nomor 032/SK/DP W-PPP/ 027/V/201 3, bertanggal 30 Mei 2013	5
3	PKNU	Ketua : Hendra Gunawan Sekre : Dian M.	Nomor SK- 810/DPP- 01/V/ 2013	Nomor A- 211/DPP- 03/III/2013 bertanggal 8 Maret 2013	1
		JUMLAH			11

 Bahwa berdasarkan pengecekan dokumen, ternyata Partai Gerindra pada masa pendaftaran tersebut telah mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5, Arief R. Wismansyah dan Sachrudin terlebih dahulu (pada tanggal 6 Juni 2013) dengan surat pencalonan Nomor 001/ARIEF-SACHRUDIN/VI/2013 tanggal 6 Juni 2013, di mana dalam surat pencalonan tersebut yang menandatangani dari Partai Gerindra adalah Nurhadi, ST sebagai Ketua dan Turidi Susanto sebagai Sekretaris, sesuai surat rekomendasi dari DPP Gerindra Nomor 05-0329/PILKADA/DPP-GERINDRA/2013 tertanggal 22 Mei 2013 yang berisi Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah Kota Tangerang Periode 2013 - 2018 kepada DPC Gerindra Kota Tangerang (sesuai Surat Keputusan Nomor 05-0431/Kpts/DPP-GERINDRA/2011 tertaggal 10 Mei 2011). Sehingga pada masa pendaftaran tersebut, terdapat dukungan ganda dari satu partai politik (Partai Gerindra) yang mengusulkan lebih dari satu pasangan calon.

- 3. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi KPU Kota Tangerang yang dituangkan dalam Surat Nomor 04-0146/DPP-GERINDRA/2013 tertanggal 11 Juni 2013 perihal Klarifikasi Kepengurusan DPC Partai Gerindra Kota Tangerang, bahwa kepengurusan DPC Gerindra Kota Tangerang berdasarkan Surat Keputusan DPP Nomor 1183/Kpts/DPP-GERINDRA/2008 tertanggal 18 Agustus 2008 di bawah kepemimpinan Sdr. Sofyan Ahmad, SH sebagai Ketua dinyatakan sudah tidak berlaku lagi karena Surat Keputusan tersebut telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Nomor 11-1102/Kpts/DPP-November 2008, di GERINDRA/2008 tertanggal 27 bawah kepemimpinan Sdr. Dr. Amril Gobel, MBA sebagai Ketua.
- 4. Bahwa selanjutnya, Surat Keputusan Nomor 11-1102/Kpts/DPP-GERINDRA/2008 tertanggal 27 November 2008, di bawah kepemimpinan Sdr. Dr. Amril Gobel, MBA sebagai Ketua juga sudah tidak berlaku, karena telah dicabut dengan Surat Keputusan Nomor 05-0431/Kpts/DPP-GERINDRA/2011 tertanggal 10 Mei 2011, dengan kepengurusan baru yaitu Sdr. Nurhadi, ST sebagai Ketua, Ir. Turidi Susanto sebagai Sekretaris, dan Sdr. Imam Buchori sebagai Bendahara DPC Partai Gerindra Kota Tangerang.
- 5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pada saat didaftarkan di KPU Kota Tangerang Tanggal 8 Juni 2013, pasangan Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR hanya didukung oleh 2 (dua) partai politik yang sah kepengurusannya dengan jumlah 6 kursi atau

12% dukungan jumlah kursi Partai Politik di DPRD Kota Tangerang, sehingga pasangan Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR tidak cukup dukungan dalam proses pengusungan partai politik atau gabungan partai politik sebagai bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Periode Tahun 2013 – 2018, yang perinciannya sebagai berikut:

N o	Nama Partai	Pengurus Partai	SK Pengurus Partai	SK Pengusungan	Jml Kursi
1	2	3	4	5	6
1	PPP	Ketua : Iskandar Sekre : Dedi Candra Wijaya	Nomor 010/SK/DPW - PPP/027/XII/ 2011, bertanggal 09 Desember 2011	Nomor 032/SK/ DPW- PPP/027/ V/2013, bertanggal 30 Mei 2013	5
2	PKNU	Ketua : Hendra Gunawan Sekre : Dian M.	Nomor SK- 810/DPP- 01/V/2013	Nomor A-211/ DPP- 03/III/2013 bertanggal 8 Maret 2013	1
	1	JUML	AH	1	6

6. Bahwa pada masa perbaikan tanggal 21 Juni 2013, pasangan Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR menyerahkan berkas perbaikan syarat dukungan partai politik ke KPU Kota Tangerang dengan menyertakan Partai Hanura berdasarkan SK Pengusungan dari DPP Partai Hanura Nomor SKEP/B/683/DPP-HANURA/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013, sehingga rincian pengusungan pada masa perbaikan terhadap pasangan ini adalah sebagai berikut:

N o	Nama Partai	Pengurus partai	SK Pengurus Partai	SK Pengusungan	Jml Kursi
1	2	3	4	5	6
1	PPP	Ketua : Iskandar Sekre : Dedi Candra Wijaya Ketua : Hendra	Nomor 010/SK/DPW- PPP/027/XII/2011 , bertanggal 09 Desember 2011 Nomor SK-810/	Nomor 032/SK/DPW- PPP/027/V/20 13, bertanggal 30 Mei 2013	5
2	PKNU	Gunawan Sekre : Dian M.	DPP-01/V/2013	211/DPP- 03/III/ 2013 bertanggal 8 Maret 2013	1
3	Hanur a	Ketua : Edy Mahfuddin Sekre : Arif Fadillah	Nomor 004/II/KEP/ HANURA/A- C/VIII/ 2010	Nomor SKEP/ B/683/DPP- HANURA/ VI/2013, bertanggal 18 Juni 2013	2
JUMLAH					

- 7. Bahwa sebelumnya, yakni pada masa pendaftaran tanggal 2 8 Juni 2013, Partai Hanura telah mengusung pasangan calon nomor urut 4, yakni Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto berdasarkan SK Pengusungan Nomor SKEP/B/671/DPP-HANURA/VI/2013 tertanggal 14 Mei 2013.
- 8. Bahwa Hasil klarifikasi KPU Kota Tangerang kepada DPP Partai HANURA, dan berdasarkan surat jawaban dari DPP Partai Hanura kepada KPU Kota Tangerang yang juga ditembuskan kepada Panwaslu Kota Tangerang Nomor A/199/DPP-HANURA/VII/2013 tertanggal 13 Juli 2013, pada pokok isinya menyatakan bahwa:
  - a. Sesuai dengan surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor SKEP/B/671/DPP-HANURA/V/2013 yang menetapkan dukungan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang kepada Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto, dan telah

- didaftarkan oleh DPC Partai HANURA Kota Tangerang Kepada KPU Kota Tangerang dalam tenggat waktu masa pendaftaran;
- b. Dalam proses perbaikan, DPC Partai HANURA Kota Tangerang dalam Surat Nomor 188/PEM/III/HANURA/A-C/VI/2013 tertanggal 17 Juni 2013 menyatakan bahwa disebabkan karena pasangan atas nama kepada Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto dinyatakan oleh KPU Kota Tangerang tidak memenuhi syarat, maka mengajukan pasangan calon lain sebagai pengganti yang diterima oleh DPP Partai HANURA sehingga diterbitkannya Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor SKEP/B/683/DPP-HANURA/VI/2013 2013 tertanggal 18 Juni 2013 tentang Pengesahan Nama Calon Walikota Tangerang Provinsi Banten Periode 2013 2018 kepada Pasangan Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR;
- c. DPP Partai HANURA meminta kepada KPU Kota Tangerang untuk menetapkan pasangan calon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan tata cara penetapan pasangan calon dalam Pemilukada.
- 9. Bahwa berdasarkan surat jawaban dari DPP Partai Hanura kepada KPU Kota Tangerang yang juga ditembuskan kepada Panwaslu Kota Tangerang tersebut tidak memberi jawaban yang tegas mengenai kepada pasangan calon yang mana dukungan yang sah dari Partai Hanura diberikan. Sebaliknya, surat jawaban dari DPP Partai Hanura tersebut memberi mempersilakan KPU Kota Tangerang untuk menentukan dukungan Partai Hanura diberikan kepada pasangan calon yang mana.
- 10. Bahwa pada tanggal 13 juli 2013 berdasarkan Berita Acara KPU Kota Tangerang Nomor 32/BA/VII/2013 tentang Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang (DR H Harry Mulya Zein dan Iskandar S.Ag) menetapkan hasil penelitian memenuhi syarat (MS), kemudian pada tanggal 15 Juli 2013 jam 06.30 WIB pasangan ini mengikuti pemeriksaan kesehatan di RSUD Kabupaten Tangerang oleh Tim Dokter IDI.

# B. Audit atas pengusulan partai politik terhadap pasangan calon nomor urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto.

 Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto, didaftarkan ke KPU Kota Tangerang pada tanggal 6 Juni 2013 pukul 14.00 WIB, dengan surat pencalonan Nomor 001/HANURA-KPNP/VI/2013. Dan berdasarkan dokumen Model B KWK KPU, surat pencalonan tertanggal 6 Juni 2013 dengan dukungan 25 partai politik, yaitu Partai Hanura dan gabungan partai-partai nonparlemen, yaitu:

N 0	Nama partai	Pengurus partai	SK Pengurus Partai	SK Pengusungan	Jml Suara
1	2	3	4	5	6
1	Hanura	Ketua : Edy Mahfuddin Sekre : Arif Fadillah	Nomor 004/II/ KEP/ HANURA/A. C/VIII/2010	Nomor SKEP/ B/671/DPP- HANURA/VI/2 013 tertanggal 14 Mei 2013	35,591
2	РКРВ	Ketua : Aca Hasanudin Sekre : Agus Nana Andira	Nomor 26/DPP-PK B/III/2013 tanggal 28 Maret 2013	TIDAK ADA	6,902
3	PPRN	Ketua : Yanuar Maisi Sekre : Mangabar S.	Nomor 007/ DK/DPW- PPRN/V/20 11 tanggal 09 juni 21012	Nomor 007.VI. 2012, bertanggal 7 Juni 2012	3,167
4	PKPI	Ketua : M. Syarifullah Sekre : Ayodya Karima	Nomor 06A/ SKEP/DPP- PKP IND/ BTN/III/201 3 tanggal 25 Maret 2013	Nomor 036/Rekom/D PP-PKPI/BTN/ II/2013, bertanggal 11 Februari 2013	5,320
5	PBR	Ketua : Abdul	Nomor 004/	Nomor 072/	11,582

		Kohar Sekre : Wayan MB Irawan	Kpts/DPW- PBR/Batn/V II/2011 tanggal 2i Juli 2011	B/DPC-PBR/K TNG/II/2013, bertanggal 15 Februari 2013	
6	PDS	Ketua : Meidy J. Kawas Sekre : Vira V.V. Wongkar	Nomor 007/ SK-DPW PDS BTN/VI/ 2011 tanggal 23 Juni 2011	TIDAK ADA	15,486
7	Partai Barisan Nasional	Ketua : Rusmono D. Sekre : Edwin Reynaldi	Nomor 60.21.03/RE V.I/SKEP/D PP.P. BARNAS/D PC/2008 tanggal 6 Agustus 2008	Nomor 045.W/ Rekom/DPP- BARNAS/XII/2 012, bertanggal 26 Desember 2012	2,346
8	Partai Matahari Bangsa	Ketua : Bahrul Ulum Sekre : Ahmad Fauzi	Nomor 73.23.08 Rev.I/DPP- P.PMB/VIII/ 2008 TANGGAL 08 Agustus 2013	Nomor 015/B/ IN/20/SK/DPD- PMB/BTN/XI/2 012, bertanggal 12 November 2012	1,323
9	Partai Pelopor	Ketua : Wiwin Erwina Sekre : Suhaendi	Nomor 037. G/SK – DPP/ W.1.29.05/P P/III-12 tanggal 05 Maret 2012	Nomor 18-H/ SK/W.26-12/ DPP/PP/XII/20 12, bertanggal 27 Desember 2012	1,346
10	Partai Patriot	Ketua : Tri Turawan T. Sekre : Mayendra	Nomor 009/SK/DP N- Patriot/BTN/ III/2012	Nomor /Rekom/DPW- Patriot/BTN/II/ 2013, bertanggal 5	8,229

			tanggal 5 Maret 2013	Februari 2013	
11	PNBKI	Ketua : Dadang Selamet Sekre : Vara Diana	Nomor 1790/B/DPP /PNBK Ind/ KPTS/IX/20 12 TANGGAL 06 September 2013	Nomor 430/ DPP-PNBK Ind/EKS/I/2013 , bertanggal 21 Januari 2013	2,306
12	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	Ketua : Tati Winarti Sekre : R. Hidayat	Nomor 011. 005/DPP/P KDI/TUS/06 /2011 tanggal 15 Juni 2011	Nomor 011. 005/PILKADA/ BUP/DPP/PKD I/TUS/01/2013, bertanggal 7 Januari 2013	2,329
13	Partai Republik Nusantara	Ketua : Sadrai Tajir Sekre : H. Kosasih	Nomor 005/ DPD/REP/S K/VIII/ tanggal 11 Agustus 2008	Nomor 04/SK- ORG/REP- BTN/II/2013, bertanggal 20 Februari 2013	3,675
14	Partai Kedaulata n	Ketua : Ade Rahmat Sekre : Oom Komariah	Nomor 27. A.7.1/SK/D PP/DPC/IV/ 2013 tanggal 10 April 2013	Nomor 114/SK.DPP.P K/S. REKOM/I/ 2013, bertanggal 31 Januari 2013	676
15	PNI- Marhaenis me	Ketua : Imam Tony P. Sekre : Ratu Luciana S.	Nomor 016005-B/ JB-13/DPP PNI-M/XII/ 2013 tanggal 7 Desember 2012	Nomor ; /PNI- M/DPC/I/2013 tanggal 15 Januari 2013	2,376
16	Partai Serikat Indonesia	Ketua : Suhendra Sekre : Ajan	Nomor 003P4/SK/D PP/C- 36/VIII/	Nomor 08/Rekom DPD PSI/BTN/2013,	610

		Junaedi	2008 tanggal 14 Agustus 2008	bertanggal 08 Januari 2013	
17	Partai Karya Perjuanga n	Ketua : Asep Muhammad R. Sekre : Andika Putra	Nomor 16/ SKEP/BPP. PAKAR PANGAN/X/ 2012 tanggal 9 Oktober 2012	Nomor 03/ Rekom/DPP- PAKAR PANGAN/BTN /I/2013, bertanggal 09 Januari 2013	2,517
18	Partai Demokrasi Kebangsa an	Ketua : Muhamadin Sekre : Yoyon Kheroni	Nomor PDK/SK/PP - SJ/349/X/20 12 tanggal 12 Oktober 2012	Nomor PDK/Rekom/P P-57/006/XI/ 2012, bertanggal 7 November 2012	4,825
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Ketua : Muhammad Kurbani Sekre : Aning PW	Nomor 2513/SK/DP P/PPDI/V/2 013	Nomor 09/DPC/PPDI/I II/2013 tanggal Maret 2013	885
20	Partai Pemuda Indonesia	Ketua : Aan Feri Adifianto Sekre : Rahmat Fajri	Nomor 008/S.KEP/ A/DPD PPI- BTN/V/2011	TIDAK ADA	2,523
21	Partai Bulan Bintang	Ketua : Sekre : TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	10,353
22	Partai Pengusah a Pekerja Indonesia	Ketua : Ade Irma Suryani Sekre : Tamrin Saiman	Nomor 010/ A/IN/16/SK- DPD- PPPI/BTN/I X/2012	MODEL B- KWK KPU, SK Kolektif, Nomor 001/HANURA- KNP/VI/2013	1,810

23	Partai Merdeka	Ketua : Sekre : TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	117
24	Partai Perjuanga n Indonesia Baru	Ketua : Ec. Ari Wibowo Sekre : Sasmito Dwiyo P.	Nomor 05/04/ PPIB/SK- PENGURU S/2008/REV .01 tanggal 25 September 2008	Nomor SK- PPIB IV/6/2013, bertanggal 12 Mei 2013	501
25	Partai Demokrasi Pembarua n	Ketua : Sunarto Sekre : Sestinawati	Nomor 2274/ II.06/SKEP/ PKN- PDP/IX/201 2 tanggal 25 September 2012	Nomor 006/PILKADA/ VI/2013, bertanggal 06 Juni 2013	2,759
	JUMLAH				

2. Bahwa atas pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 4, pada tanggal 15 Juni 2013 KPU Kota Tangerang mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi berkas pencalonan Pasangan Calon Ir. H. AHMAD MARJU KODRI - Drs. **GATOT SUPRIJANTO** dengan Nomor 312/KPU-KOTA-015.436421/VI/2013, dan Berita Acara Nomor 21/BA/VI/2013 yang isinya menyatakan kelengkapan administrasi pengajuan bakal calon wakil walikota Tangerang oleh partai atau/gabungan partai politik tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat (TMS), dengan alasan PKPB tidak dimasukkan dalam suara sah karena dianggap dukungan ganda, sementara PBB, PPI, dan Partai Merdeka tidak dimasukkan karena dianggap sudah beralih ke calon lain, sedangkan PPIB dan PDP yang menandatangani surat pencalonan adalah pengurus parpol tingkat provinsi, sehingga menurut

- KPU Kota Tangerang jumlah suara sah partai pengusung sebanyak 102.377 atau kurang 15% (minimal 104.910).
- 3. Bahwa pada masa perbaikan berkas pencalonan (16 22 Juni 2013), Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. AHMAD MARJU KODRI Drs. GATOT SUPRIJANTO menyerahkan berkas perbaikan kepada KPU Kota Tangerang pada tanggal 20 Juni 2013 dengan menyertakan tambahan dukungan partai baru yang tidak menggunakan hak pengusulan pada saat pendaftaran, yaitu Partai Buruh (1.082 suara) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (1.721 suara), berikut di dalamnya masih menyertakan dukungan dari Partai Hanura. Pada masa perbaikan itu juga, yaitu tanggal 21 Juni 2013, Pasangan Calon Nomor urut 1, Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR menyerahkan berkas perbaikan syarat dukungan partai politik ke KPU Kota Tangerang dengan menyertakan Partai Hanura, sehingga terjadi dukungan ganda.
- 4. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juli 2013 KPU Kota Tangerang Surat Pemberitahuan mengeluarkan Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan berkas pencalonan Pasangan Calon Ir. H. AHMAD MARJU KODRI - Drs. GATOT SUPRIJANTO Nomor 378/KPU-KOTA-015.436421/VII/2013, dan Nomor 29/BA/VII/2013 yang isinya menyatakan Berita Acara administrasi pengajuan bakal calon walikota dan wakil walikota tangerang oleh partai politik atau/gabungan partai politik tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat (TMS), dengan alasan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia dan Partai Buruh tidak menggunakan haknya pada masa pendaftaran, dan Partai Hanura mengalihkan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR, sehingga menurut KPU Kota Tangerang jumlah suara sah partai pengusung sebanyak 74.068 atau kurang 15% (minimal 104.910).
- 5. Bahwa setelah dilakukan audit terhadap kecukupan jumlah suara dukungan dari partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto, hasilnya sebagai berikut:

- a. PPIB dalam SK pengurus provinsi dengan nomor 05/04/PPIB/SK-PENGURUS/2008 Rev:01 tanggal 25 September 2008 yang menetapkan ketua Dewan Pimpinan Daerah An. Ec. Ari Wibowo dan Sekretaris Sasmito Dwijo Priyo, SE ternyata sama dengan Ketua dan Sekretaris pengurus PPIB tingkat provinsi. Artinya, ketua dan sekretaris PPIB tingkat Provinsi Banten merangkap ketua dan sekretaris tingkat Kota Tangerang.
- b. PDP yang menandatangani pencalonan Model B1 adalah pengurus tingkat Provinsi Banten, yang seharusnya pengurus di Kota Tangerang yaitu Sunarto (Ketua), dan Sestinawati (Sekretaris).
- c. Partai Pemuda Indonesia (PPI) tidak ada SK pengusungan.
- d. Partai Bulan Bintang (PBB) pada saat pendaftaran telah mengusung pasangan calon nomor urut 2, Abdul Syukur dan Hilmi Fuad (dukungan ganda).
- e. Partai Merdeka tidak ada SK pengusungan.
- f. PKPB sesui Surat Keputusan DPP Partai Karya Peduli Bangsa Nomor SKEP – 74/DPP-PKPB/VI/2013 tentang Persetujuan Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Walikota Tangerang Tahun 2013 menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Sdr. H. Abdul Syukur dan Sdr. H. Hilmi Fuad (dukungan ganda).
- 6. Bahwa berdasarkan audit Panwaslu Kota Tangerang terhadap pengusulan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto, pada saat didaftarakan ke KPU Kota Tangerang pada Tanggal 6 Juni 2013, maka jumlah suara partai politik pengusul telah lebih dari 15% (minimal 104.910 suara) atau berjumlah 106.399 suara, dengan rincian sebagai berikut:

N 0	Nama Partai	Pengurus Partai	SK Pengurus Partai	SK Pengusunga n	Jml Suara
1	2	3	4	5	6
1		Ketua : Edy Mahfuddin Sekre : Arif Fadillah	Nomor 004/II/ KEP/HANURA /A.C/VIII/2010	Nomor SKEP /B/671/DPP- HANURA/VI/ 2013 tertanggal 14 Mei 2013	35,591
2	PPRN	Ketua : Yanuar Maisi Sekre :	Nomor 007/ DK/DPW- PPRN/V/2011 tanggal 09 juni	Nomor 007. VI.2012, bertanggal 7 Juni 2012	3,167

		Mangabar S.	21012		
3	PKPI	Ketua : M. Syarifullah Sekre : Ayodya Karima	Nomor 06A/ SKEP/DPP- PKP IND/BTN/III/20 13 tanggal 25 Maret 2013	Nomor 036/ Rekom/DPP- PKPI/BTN/II/ 2013, bertanggal 11 Februari 2013	5,320
4	PBR	Ketua : Abdul Kohar Sekre : Wayan MB Irawan	Nomor 004/ Kpts/DPW- PBR/Batn/VII/2 011 tanggal 2i Juli 2011	Nomor 072/ B/DPC- PBR/K TNG/II/2013, bertanggal 15 Februari 2013	11,582
5	Partai Barisan Nasional	Ketua : Rusmono D. Sekre : Edwin Reynaldi	Nomor 60.21. 03/REV.I/SKE P/DPP.P. BARNAS/DPC /2008 tanggal 6 Agustus 2008	Nomor 045. W/Rekom/DP P-BARNAS/ XII/2012, bertanggal 26 Desember 2012	2,346
6	PDS	Ketua : Meidy J. Kawas Sekre : Vira V.V. Wongkar	Nomor 007/ SK-DPW PDS BTN/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011	MODEL B- KWK KPU, SK Kolektif, Nomor 001/HANURA -KNP/VI/2013	15,486
7	Partai Matahari Bangsa	Ketua : Bahrul Ulum Sekre : Ahmad Fauzi	Nomor 73.23. 08 Rev.I/DPP- P.PMB/VIII/20 08 TANGGAL 08 Agustus 2013	Nomor 015/ B/IN/20/SK/D PD- PMB/BTN/ XI/2012, bertanggal 12 November 2012	1,323
8	Partai Pelopor	Ketua : Wiwin Erwina Sekre :	Nomor 037. G/SK – DPP/ W.1.29.05/PP/I II-12 tanggal	Nomor 18- H/SK/W.26- 12/DPP/PP/X II/2012, bertanggal 27	1,346

		Suhaendi	05 Maret 2012	Desember 2012	
9	Partai Patriot	Ketua : Tri Turawan T. Sekre : Mayendra	Nomor 009/ SK/DPN- Patriot/BTN/III/ 2012 tanggal 5 Maret 2013	Nomor / Rekom/DPW- Patriot/BTN/II /2013, bertanggal 5 Februari 2013	8,229
10	PNBKI	Ketua : Dadang Selamet Sekre : Vara Diana	Nomor 1790/ B/DPP/PNBK Ind/KPTS/IX/2 012 TANGGAL 06 September 2013	Nomor 430/ DPP-PNBK Ind/EKS/I/201 3, bertanggal 21 Januari 2013	2,306
11	Partai Republik Nusantara	Ketua : Sadrai Tajir Sekre : H. Kosasih	Nomor 005/ DPD/REP/SK/ VIII/ tanggal 11 Agustus 2008	Nomor 04/SK- ORG/REP- BTN/II/2013, bertanggal 20 Februari 2013	3,675
12	Partai Kedaulata n	Ketua : Ade Rahmat Sekre : Oom Komariah	Nomor 27.A.7. 1/SK/DPP/DP C/IV/2013 tanggal 10 April 2013	Nomor 114/SK.DPP. PK/S. REKOM/ I/2013, bertanggal 31 Januari 2013	676
13	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	Ketua : Tati Winarti Sekre : R. Hidayat	Nomor 011. 005/DPP/PKDI /TUS/06/2011 tanggal 15 Juni 2011	Nomor 011. 005/PILKADA /BUP/DPP/P KDI/TUS/01/2 013,	2,329

				bertanggal 7 Januari 2013	
14	PNI-M	Ketua : Imam Tony P. Sekre : Ratu Luciana S.	Nomor 016005-B/JB- 13/DPP PNI- M/XII/2013 tanggal 7 Desember 2012	Nomor; /PNI-M/ DPC/I/2013 tanggal 15 Januari 2013	2,376
15	Partai Serikat Indonesia	Ketua : Suhendra Sekre : Ajan Junaedi	Nomor 003P4/ SK/DPP/C- 36/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008	Nomor 08/ Rekom DPD PSI/BTN/201 3, bertanggal 08 Januari 2013	610
16	Partai Karya Perjuanga n	Ketua : Asep Muhammad R. Sekre : Andika Putra	Nomor 16/ SKEP/BPP.PA KAR PANGAN/X/20 12 tanggal 9 Oktober 2012	Nomor /DPK-TGR/ I/2013 tanggal 15 Januari 2013	2,517
17	Partai Demokrasi Kebangsa an	Ketua : Muhamadin Sekre : Yoyon Kheroni	Nomor PDK/SK/PP- SJ/349/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012	Nomor PDK/ Rekom/PP- 57/006/XI/20 12, bertanggal 7 November 2012	4,825
18	partai penegak demokrasi indonesia	Ketua : Muhammad Kurbani Sekre : Aning PW	Nomor 2513/ SK/DPP/PPDI/ V/2013	Nomor 09/ DPC/PPDI/III/ 2013 tanggal Maret 2013	885
19	Partai Pengusah a Pekerja Indonesia	Ketua : Ade Irma Suryani Sekre : Tamrin Saiman	Nomor 010/ A/ IN/16/SK- DPD- PPPI/BTN/IX/2 012	MODEL B- KWK KPU, SK Kolektif, Nomor 001/HANURA -KNP/VI/2013	1,810

JUMLAH	106.39

# C. Pengawasan atas pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto.

- Bahwa KPU Provinsi Banten telah melaksanakan pemeriksaan tes kesehatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto pada tanggal 9 Oktober 2013 oleh tim Dokter IDI Tangerang, dan hasil pemeriksaan kesehatannya telah diserahkan tim Dokter IDI Tangerang kepada KPU Provinsi Banten pada tanggal 14 Oktober 2013.
- 2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut, dalam Model BB5-KWK KPU yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan khusus Dr. I Gede Rai Kosa, SpPD, menyatakan bahwa Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang.
- [2.4] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang menyampaikan laporan pada persidangan tanggal 7 November 2013 dan telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 21 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 Oktober 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

# A. Tahapan Pencalonan Dari Jalur Partai Politik Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013

- 1. Bahwa berdasarkan SK KPU Kota Tangerang Nomor 60/KPTS/KPU-kota.Tng/015.436421/V/2013 tanggal 23 Mei 2013, syarat dukungan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang adalah 8 kursi atau berdasarkan perolehan suara minimal 104.910 suara (sama dengan 15%);
- Bahwa Perolehan Suara Sah Partai Politik Tingkat Kota Tangerang Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 berdasarkan SK KPU

Kota Tangerang Nomor 60/KPTS/KPU-Kota.Tng/015.436421/V/2013, sebagai berikut:

No	No Urut Parpol	Nama Parpol	Suara Sah
1	2	3	4
1	1	Partai Hati Nurani Rakyat	35,591
2	2	Partai Karya Peduli Bangsa	6,902
3	3	Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia	1,810
4	4	Partai Peduli Rakyat Nasional	3,167
5	5	Partai Gerakan Indonesia Raya	42,466
6	6	Partai Barisan Nasional	2,346
7	7	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	5,320
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	70,707
9	9	Partai Amanat Nasional	32,512
10	10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	501
11	11	Partai Kedaulatan	676
12	12	Partai Persatuan Daerah	604
13	13	Partai Kebangkitan Bangsa	31,780
14	14	Partai Pemuda Indonesia	2,523
15	15	Partai Nasional Indonesia Marhaenis	2,376
16	16	Partai Demokrasi Pembaruan	2,759
17	17	Partai Karya Perjuangan	2,517
18	18	Partai Matahari Bangsa	1,323
19	19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	885
20	20	Partai Demokrasi Kebangsaan	4,825
21	21	Partai Republik Nusantara	3,675
22	22	Partai Pelopor	1,346

23	23	Partai Golongan Karya	90,448
24	24	Partai Persatuan Pembangunan	40,286
25	25	Partai Damai Sejahtera	15,486
26	26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	2,306
27	27	Partai Bulan Bintang	10,353
28	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	67,800
29	29	Partai Bintang Reformasi	11,582
30	30	Partai Patriot	8,229
31	31	Partai Demokrat	172,746
32	32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	2,329
33	33	Partai Indonesia Sejahtera	555
34	34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	11,139
35	35	Partai Merdeka	117
36	36	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	1,721
37	37	Partai Serikat Indonesia	610
38	38	Partai Buruh	1,082
		JUMLAH	699,400

- 3. Bahwa berdasarkan SK KPU Kota Tangerang Nomor 27/KPTS/KPU-Kota.Tng/015.436421/III/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang tahun 2013;
  - Pencalonan dari Parpol dan gabungan partai politik, pengumuman pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang tanggal 29 – 30 Mei 2013;
  - Pengambilan formulir tanggal 31 Mei 1 Juni 2013;
  - Pendaftaran pasangan calon tanggal 02 Juni 08 Juni 2013;
  - Penelitian tanggal 09 15 Juni 2013;

- Pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi kepada partai politik/gabungan partai politik tanggal 09 – 15 Juni 2013;
- Melengkapi/memperbaiki soal pencalonan/syarat calon tanggal mengajukan calon Baru dari partai politik/gabungan partai politik tanggal 16 – 22 Juni 2013;

# B. Hasil Pengawasan Proses Verifikasi Ulang Pengusulan Partai Politik Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar.

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, didaftarkan ke KPU Kota Tangerang pada Tanggal 08 Juni 2013 pukul 23.30 WIB, dengan surat pencalonan Nomor 001/005-Kualisi/VI/2013 Tanggal 8 Juni 2013, berdasarkan Dokumen Model B KWK KPU surat pencalonan tertanggal 8 Juni 2013 dengan dukungan 3 partai politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik Tingkat Kota Tangerang, yaitu:

N o	Nama Partai	Pengurus Partai	SK Pengurus Partai	SK Pengusunga	Jml Kurs
				n	i
1	2	3	4	5	6
1	Gerindra	Ketua : Sofyan Ahmad Sekre : Sadimin Supriyadi	Nomor 08-1183/ Kpts/DPP- GERINDRA/2008	Nomor 254/ PILKADA/DPP - GERINDRA/2 012, bertanggal 12 september 2012	5
2	PPP	Ketua : Iskandar Sekre : Dedi Candra Wijaya	Nomor 010/SK/ DPW-PPP/027/ XII/2011, bertanggal 09 Desember 2011	Nomor 032/ SK/DPW-PPP/ 027/V/2013, bertanggal 30 Mei 2013	5
3	PKNU	Ketua : Hendra Gunawan	Nomor SK-810/ DPP-01/V/2013	Nomor A-211/ DPP- 03/III/2013 bertanggal 8	1

		Sekre : Dian M.		Maret 2013	
JUMLAH				11	

- 2. Bahwa berdasarkan pengecekan dokumen ternyata pada masa pendaftaran Partai Gerindra telah mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5, Arief R. Wirsmansyah dan Syahrudin yang mendaftar lebih dahulu pada tanggal 6 Juni 2013 dengan surat pencalonan Nomor 001/ARIEF-SACHRUDIN/VI/2013 tanggal 6 Juni 2013, di mana dalam surat pencalonan tersebut yang menandatangani dari Partai Gerindra adalah Nurhadi, ST sebagai Ketua dan Turidi Susanto sebagai Sekretaris, sesuai surat rekomendasi DPP Gerindra Nomor 05-0329/PILKADA/DPPdari GERINDRA/2013 tertanggal 22 Mei 2013 Hal Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah Kota Tangerang Periode 2013 - 2018 kepada DPC Gerindra Kota Tangerang (sesuai Surat Keputusan Nomor 05-0431/Kpts/DPP-GERINDRA/2011 tertaggal 10 Mei 2011). Sehingga pada masa pendaftaran terjadi dukungan ganda satu partai politik mengusulkan dua pasangan calon
- 3. Bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi KPU Kota Tangerang yang dituangkan dalam Surat Nomor 04-0146/DPP-GERINDRA/2013 tertanggal 11 Juni 2013 Perihal Klarifikasi Kepengurusan DPC Partai Gerindra Kota Tangerang, bahwa kepengurusan DPC Gerindra Kota Tangerang berdasarkan Surat Keputusan DPP Nomor 08-1183/Kpts/DPP-GERINDRA/2008 tertanggal 18 Agustus 2008 di bawah kepemimpinan sdr. Sofyan Ahmad, SH sebagai Ketua dinyatakan sudah tidak berlaku lagi karena Surat Keputusan tersebut telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Nomor 11-1102/Kpts/DPP-GERINDRA/2008 tertanggal 27 November 2008, di bawah kepemimpinan Sdr. Dr. Amril Gobel, MBA sebagai Ketua.
- 4. Bahwa Surat Keputusan Nomor 11-1102/Kpts/DPP-GERINDRA/2008 tertanggal 27 November 2008, di bawah kepemimpinan Sdr. Dr. Amril Gobel, MBA sebagai Ketua sudah tidak berlaku, dicabut dengan Surat Keputusan Nomor 05-0431/Kpts/DPP-GERINDRA/2011 tertaggal 10 Mei 2011, dengan kepengurusan baru yaitu Sdr. Nurhadi, ST sebagai Ketua, Ir. Turidi Susanto sebagai Sekretaris, serta Sdr. Imam Buchori sebagai Bendahara DPC Partai Gerindra Kota Tangerang.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pada saat didaftarkan di KPU Kota Tangerang Tanggal 8 Juni 2013, pasangan Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR hanya didukung oleh 2 (dua) partai politik yang sah kepengurusannya dengan jumlah 6 kursi atau 12% dukungan jumlah kursi Partai Politik di DPRD Kota Tangerang, sehingga pasangan Dr. H.M. HARRY **MULYA** ZEIN, M.Si dan **ISKANDAR** tidak cukup dukungan/pengusungan partai politik dalam pencalonan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Periode Tahun 2013 – 2018, dengan rincian sebagai berikut:

N 0	Nama Partai	Pengurus partai	SK Pengurus Partai	SK Pengusunga n	Jml Kursi
1	2	3	4	5	6
1	PPP	Ketua : Iskandar Sekre : Dedi Candra Wijaya	Nomor 010/ SK/DPW-PPP/ 027/XII/2011, bertanggal 09 Desember 2011	Nomor 032/ SK/DPW- PPP/ 027/V/2013, bertanggal 30 Mei 2013	5
2	PKNU	Ketua : Hendra Gunawan Sekre : Dian M.	Nomor SK- 810/ DPP- 01/V/2013	Nomor A- 211/ DPP- 03/III/2013 bertanggal 8 Maret 2013	1
JUMLAH					6

6. Bahwa pada masa perbaikan tanggal 21 Juni 2013, Pasangan Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR menyerahkan berkas perbaikan syarat dukungan partai politik ke KPU Kota Tangerang dengan menyertakan Partai Hanura berdasarkan SK Pengusungan dari DPP Partai Hanura Nomor SKEP/B/683/DPP-HANURA/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013, sehingga rincian pengusungan pada masa perbaikan sebagai berikut:

N 0	Nama Partai	Pengurus Partai	SK Pengurus Partai	SK Pengusunga n	Jml Kursi
1	2	3	4	5	6
1	PPP	Ketua : Iskandar Sekre : Dedi Candra Wijaya	Nomor 010/ SK/ DPW-PPP/ 027/XII/201, bertanggal 09 Desember 2011	Nomor 032/ SK/DPW- PPP/ 027/V/2013, bertanggal 30 Mei 2013	5
2	PKNU	Ketua : Hendra Gunawan Sekre : Dian M.	DPP-01/V/2013	211/ DPP- 03/III/ 2013 bertanggal 8 Maret 2013	1
3	HANURA	Ketua : Edy Mahfuddin Sekre : Arif Fadillah	Nomor 004/II/ KEP/HANURA/ A-C/VIII/2010	Nomor SKEP/ B/683/DPP- HANURA/VI/ 2013, bertanggal 18 Juni 2013	2
		JUM	ILAH	1	8

- Bahwa sebelumnya pada masa pendaftaran Tanggal 02 08 Juni 2013
   Partai Hanura telah mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto berdasarkan SK Pengusungan Nomor SKEP/B/671/DPP-HANURA/VI/2013 tertanggal 14 Mei 2013.
- 8. Bahwa Hasil klarifikasi KPU Kota Tangerang kepada DPP Partai HANURA, dan berdasarkan surat jawaban dari DPP Partai Hanura kepada KPU Kota Tangerang yang juga ditembuskan ke Panwaslu Kota Tangerang, Nomor A/199/DPP-HANURA/VII/2013 tertanggal 13 Juli 2013 yang pada pokok isinya menyatakan bahwa;
  - Sesuai dengan surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor SKEP/B/671/DPP-HANURA/V/2013 yang menetapkan dukungan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang kepada Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto, dan telah didaftarkan oleh DPC

- Partai HANURA Kota Tangerang Kepada KPU Kota Tangerang dalam tenggat waktu masa pendaftaran;
- Dalam proses perbaikan melengkapi berkas pasangan calon, sebelum berakhirnya masa perbaikan yang telah ditentukan. DPC Partai HANURA Kota Tangerang dalam Surat Nomor 188/PEM/III/HANURA/A-C/VI/2013 tertanggal 17 Juni 2013 bahwa pasangan atas nama kepada Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto tidak memenuhi syarat, dan mengajukan pasangan calon lain sebagai pengganti yang diterima oleh DPP Partai HANURA sehingga diterbitkannya Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor SKEP/B/683/DPP-HANURA/VI/2013 2013 tertanggal 18 Juni 2013 tentang Pengesahan Nama Calon Walikota Tangerang Provinsi Banten Periode 2013 2018 kepada Pasangan Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR;
- DPP Partai HANURA meminta kepada KPU Kota Tangerang untuk menetapkan pasangan calon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan tata cara penetapan pasangan calon dalam Pilkada.
- 9. Bahwa pada Tanggal 13 juli 2013 berdasarkan Berita Acara KPU Kota Tangerang Nomor 32/BA/VII/2013 tentang hasil penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan bakal calon walikota dan wakil walikota tangerang (DR H Harry Mulya Zein dan Iskandar S.Ag) menetapkan hasil penelitian memenuhi sarat (MS), kemudian pada Tanggal 15 Juli 2013 jam 06.30 WIB, mengikuti pemeriksaan kesehatan di RSUD Kabupaten Tangerang oleh Tim Dokter IDI.
- C. Hasil Pengawasan Proses Verifikasi Ulang Pengusulan Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir.
   H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto.
  - 1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto, didaftarkan ke KPU Kota Tangerang pada Tanggal 06 Juni 2013 pukul 14.00 WIB, dengan surat pencalonan Nomor 001/HANURA-KPNP/VI/2013, berdasarkan Dokumen Model B KWK KPU surat pencalonan tertanggal 06 Juni 2013 dengan dukungan 25 partai politik, yaitu Partai Hanura, dan selebihnya gabungan partai non parlemen, yaitu:

N 0	Nama Partai	Pengurus Partai	SK Pengurus Partai	SK Pengusung an	Jml Suara
1	2	3	4	5	6
1	Hanura	Ketua : Edy Mahfuddin Sekre : Arif Fadillah	Nomor 004/ II/ KEP/HANUR A/A.C/VIII/20 10	Nomor SKEP/B/671 /DPP- HANURA/VI /2013 tertanggal 14 Mei 2013	35,591
2	РКРВ	Ketua : Aca Hasanudin Sekre : Agus Nana Andira	Nomor 26/DPP- PKB/III/2013 tanggal 28 Maret 2013	TIDAK ADA	6,902
3	PPRN	Ketua : Yanuar Maisi Sekre : Mangabar S.	Nomor 007/ DK/DPW- PPRN/V/201 1 tanggal 09 juni 21012	Nomor 007. VI.2012, bertanggal 7 Juni 2012	3,167
4	PKPI	Ketua : M. Syarifullah Sekre : Ayodya Karima	Nomor 06A/ SKEP/DPP- PKP IND/ BTN/III/2013 tanggal 25 Maret 2013	Nomor 036/ Rekom/DPP - PKPI/BTN/II /2013, bertanggal 11 Februari 2013	5,320
5	PBR	Ketua : Abdul Kohar Sekre : Wayan MB Irawan	Nomor 004/ Kpts/DPW- PBR/Batn/VII/ 2011 tanggal 2i Juli 2011	Nomor 072/B/DPC- PBR/K TNG /II/2013, bertanggal 15 Februari 2013	11,582

6	PDS	Ketua : Meidy J. Kawas Sekre : Vira V.V. Wongkar	Nomor 007/ SK-DPW PDS BTN/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011	TIDAK ADA	15,486
7	Partai Barisan Nasional	Ketua : Rusmono D. Sekre : Edwin Reynaldi	Nomor 60.21. 03/REV.I/SK EP/DPP.P. BARNAS/DP C/2008 tanggal 6 Agustus 2008	Nomor 045. W/Rekom/D PP- BARNAS/ XII/2012, bertanggal 26 Desember 2012	2,346
8	Partai Matahari Bangsa	Ketua : Bahrul Ulum Sekre : Ahmad Fauzi	Nomor 73. 23.08 Rev.I/DPP- P.PMB/VIII/2 008 TANGGAL 08 Agustus 2013	Nomor 015/ B/IN/20/SK/ DPD- PMB/BTN/X I/2012, bertanggal 12 November 2012	1,323
9	Partai Pelopor	Ketua : Wiwin Erwina Sekre : Suhaendi	Nomor 037. G/SK – DPP/W.1.29. 05/PP/III-12 tanggal 05 Maret 2012	Nomor 18- H/SK/W.26- 12/DPP/PP/ XII/2012, bertanggal 27 Desember 2012	1,346
10	Partai Patriot	Ketua : Tri Turawan T. Sekre : Mayendra	Nomor 009/ SK/DPN- Patriot/BTN/II I/2012 tanggal 5 Maret 2013	Nomor /Rekom/DP W- Patriot/BTN/ II/2013, bertanggal 5 Februari 2013	8,229
11	PNBKI	Ketua : Dadang	Nomor 1790/	Nomor 430/	2,306

		Selamet Sekre : Vara Diana	B/DPP/PNBK Ind/KPTS/IX/ 2012 TANGGAL 06 September 2013	DPP-PNBK Ind/EKS/I/2 013, bertanggal 21 Januari 2013	
12	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	Ketua : Tati Winarti Sekre : R. Hidayat	Nomor 011. 005/DPP/PK DI/TUS/06/20 11 tanggal 15 Juni 2011	Nomor 011. 005/PILKAD A/BUP/DPP /PKDI/TUS/ 01/2013, bertanggal 7 Januari 2013	2,329
13	Partai Republik Nusantara	Ketua : Sadrai Tajir Sekre : H. Kosasih	Nomor 005/ DPD/REP/SK /VIII/ tanggal 11 Agustus 2008	Nomor 04/ SK-ORG/ REP- BTN/II/2013 , bertanggal 20 Februari 2013	3,675
14	Partai Kedaulata n	Ketua : Ade Rahmat Sekre : Oom Komariah	Nomor 27.A. 7.1/SK/DPP/ DPC/IV/2013 tanggal 10 April 2013	Nomor 114/ SK.DPP.PK/ S. REKOM/ I/2013, bertanggal 31 Januari 2013	676
15	PNI- marhaenis me	Ketua : Imam Tony P. Sekre : Ratu Luciana S.	Nomor 016005-B/JB- 13/DPP PNI- M/XII/2013 tanggal 7 Desember 2012	Nomor /PNI -M/DPC/ I/2013 tanggal 15 Januari 2013	2,376
16	Partai Serikat Indonesia	Ketua : Suhendra Sekre : Ajan Junaedi	Nomor 003P4 /SK/DPP/C- 36/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008	Nomor 08/ Rekom DPD PSI/BTN/20 13, bertanggal 08 Januari	610

				2013	
17	Partai Karya Perjuanga n	Ketua : Asep Muhammad R. Sekre : Andika Putra	Nomor 16/ SKEP/BPP.P AKAR PANGAN/X/2 012 tanggal 9 Oktober 2012	Nomor 03/ Rekom/DPP -PAKAR PANGAN/B TN/I/2013, bertanggal 09 Januari 2013	2,517
18	Partai Demokrasi Kebangsa an	Ketua : Muhamadin Sekre : Yoyon Kheroni	Nomor PDK/ SK/PP- SJ/349/X/201 2 tanggal 12 Oktober 2012	Nomor PDK/Rekom /PP-57/006/ XI/2012, bertanggal 7 November 2012	4,825
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Ketua : Muhammad Kurbani Sekre : Aning PW	Nomor 2513/ SK/DPP/PPD I/V/2013	Nomor 09/ DPC/PPDI/II I/2013 tanggal Maret 2013	885
20	Partai Pemuda Indonesia	Ketua : Aan Feri Adifianto Sekre : Rahmat Fajri	Nomor 008/ S.KEP/A/DP D PPI-BTN/ V/2011	TIDAK ADA	2,523
21	Partai Bulan Bintang	Ketua : Sekre : TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	10,353
22	Partai Pengusah a Pekerja Indonesia	Ketua : Ade Irma Suryani Sekre : Tamrin Saiman	Nomor 010/A/ IN/16/SK- DPD- PPPI/BTN/IX/ 2012	MODEL B- KWK KPU, SK Kolektif, Nomor 001/HANUR A- KNP/VI/201	1,810

				3		
23	Partai Merdeka	Ketua : Sekre : TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	117	
24	Partai Perjuanga n Indonesia Baru	Ketua : Ec. Ari Wibowo Sekre : Sasmito Dwiyo P.	Nomor 05/04/ PPIB/SK- PENGURUS/ 2008/REV.01 tanggal 25 September 2008	Nomor SK- PPIB IV/6/ 2013, bertanggal 12 Mei 2013	501	
25	Partai Demokrasi Pembarua n	Ketua : Sunarto Sekre : Sestinawati	Nomor 2274/II. 06/SKEP/PK N- PDP/IX/2012 tanggal 25 September 2012	Nomor 006/ PILKADA/VI /2013, bertanggal 06 Juni 2013	2,759	
	JUMLAH					

- 2. Bahwa setelah dilakukan verifikasi ulang terhadap kecukupan jumlah suara dukungan dari partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto, hasilnya sebagai berikut:
  - a. PPIB SK nomor 05/04/PPIB/SK-PENGURUS/2008 Rev;01 tanggal 25 September 2008 yang menetapkan ketua Dewan Pimpinan Daerah An. Ec. Ari Wibowo, Sekretaris Sasmito Dwijo Priyo, SE ternyata sama dengan lampiran Surat Keputusan tersebut untuk Ketua dan Sekretaris An. Ec. Ari Wibowo, Sekretaris Sasmito Dwijo Priyo, SE ditetapkan tanggal 25 September 2008.
  - PDP Yang menandatangani pencalonan Model B1 Pengurus dari Provinsi Banten, yang seharusnya pengurus di Kota Tangerang yaitu Sunarto (Ketua), dan Sestinawati (Sekretaris).
  - c. Partai Pemuda Indonesia (PPI) tidak ada SK pengusungan.

- d. Partai Bulan Bintang (PBB) pada saat pendaftaran telah mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2, Abdul Syukur dan Hilmi Fuad (dukungan ganda).
- e. Partai Merdeka tidak ada SK pengusungan.
- f. PKPB sesui surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa Nomor SKEP – 74/DPP-PKPB/VI/2013 tentang Persetujuan Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Walikota Tangerang Tahun 2013 menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Sdr. H. Abdul Syukur dan Sdr. H. Hilmi Fuad (dukungan ganda).
- 3. Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kota Tangerang terhadap hasil verifikasi ulang pengusulan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto, pada saat didaftarakan ke KPU Kota Tangerang pada tanggal 6 Juni 2013, maka jumlah suara partai politik pengusul lebih dari 15% (minimal 104.910 suara) atau berjumlah 106.399 suara, dengan rincian sebagai berikut:

N 0	Nama Partai	Pengurus Partai	SK Pengurus Partai	SK Pengusungan	Jml Suara
1	2	3	4	5	6
1		Ketua : Edy Mahfuddin Sekre : Arif Fadillah	Nomor 004/II/ KEP/HANUR A/A.C/VIII/20 10	Nomor SKEP/ B/671/DPP- HANURA/VI/20 13 tertanggal 14 Mei 2013	35,591
2	PPRN	Ketua : Yanuar Maisi Sekre : Mangabar S.	Nomor 007/ DK/DPW- PPRN/V/201 1 tanggal 09 juni 21012	Nomor 007.VI. 2012, bertanggal 7 Juni 2012	3,167
3	PKPI	Ketua : M. Syarifullah Sekre : Ayodya Karima	Nomor 06A/ SKEP/DPP- PKP IND/BTN/ III/2013 tanggal 25 Maret 2013	Nomor 036/ Rekom/DPP- PKPI/BTN/II/201 , bertanggal 11 Februari 2013	5,320

4	PBR	Ketua : Abdul Kohar Sekre : Wayan MB Irawan	Nomor 004/ Kpts/DPW- PBR/Batn/VII/ 2011 tanggal 2i Juli 2011	Nomor 072/B/ DPC-PBR/K TNG/II/2013, bertanggal 15 Februari 2013	11,582
5	Partai Barisan Nasional	Ketua : Rusmono D. Sekre : Edwin Reynaldi	Nomor 60.21. 03/REV.I/SK EP/DPP.P. BARNAS/DP C/2008 tanggal 6 Agustus 2008	Nomor 045.W/ Rekom/DPP- BARNAS/XII/20 12, bertanggal 26 Desember 2012	2,346
6	PDS	Ketua : Meidy J. Kawas Sekre : Vira V.V. Wongkar	Nomor 007/ SK-DPW PDS BTN/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011	MODEL B-KWK KPU, SK Kolektif, Nomor 001/ HANURA- KNP/VI/2013	15,486
7	Partai Matahari Bangsa	Ketua : Bahrul Ulum Sekre : Ahmad Fauzi	Nomor 73. 23.08 Rev. I/DPP- P.PMB/ VIII/2008 TANGGAL 08 Agustus 2013	Nomor 015/B/IN/20/SK/ DPD-PMB/ BTN/ XI/2012, bertanggal 12 November 2012	1,323
8	Partai Pelopor	Ketua : Wiwin Erwina Sekre : Suhaendi	Nomor 037. G/SK – DPP/ W.1.29.05/PP /III-12 tanggal 05 Maret 2012	Nomor 18- H/SK/W.26- 12/DPP/PP/XII/ 2012, bertanggal 27 Desember 2012	1,346
9	Partai Patriot	Ketua : Tri Turawan T. Sekre : Mayendra	Nomor 009/ SK/DPN- Patriot/BTN/II I/2012 tanggal 5 Maret 2013	Nomor /Rekom/DPW- Patriot/BTN/II/2 013, bertanggal 5 Februari 2013	8,229
10	PNBKI	Ketua : Dadang	Nomor 1790/ B/DPP/PNBK Ind/KPTS/IX/	Nomor 430/DPP-PNBK Ind/ EKS/I/2013,	2,306

		Selamet Sekre : Vara Diana	2012 TANGGAL 06 September 2013	bertanggal 21 Januari 2013	
11	Partai Republik Nusantara	Ketua : Sadrai Tajir Sekre : H. Kosasih	Nomor 005/ DPD/REP/SK /VIII/ tanggal 11 Agustus 2008	Nomor 04/SK- ORG/REP- BTN/II/2013, bertanggal 20 Februari 2013	3,675
12	Partai Kedaulata n	Ketua : Ade Rahmat Sekre : Oom Komariah	Nomor 27. A.7.1/SK/DP P/DPC/IV/20 13 tanggal 10 April 2013	Nomor 114/SK. DPP.PK/S. REKOM/I/2013, bertanggal 31 Januari 2013	676
13	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	Ketua : Tati Winarti Sekre : R. Hidayat	Nomor 011. 005/DPP/PK DI/TUS/06/20 11 tanggal 15 Juni 2011	Nomor 011. 005/PILKADA/B UP/DPP/PKDI/T US/01/2013, bertanggal 7 Januari 2013	2,329
14	PNI-M	Ketua : Imam Tony P. Sekre : Ratu Luciana S.	Nomor 016005-B/JB- 13/DPP PNI- M/XII/2013 tanggal 7 Desember 2012	Nomor; /PNI- M/DPC/I/2013 tanggal 15 Januari 2013	2,376
15	Partai Serikat Indonesia	Ketua : Suhendra Sekre : Ajan Junaedi	Nomor 003P4 /SK/DPP/C- 36/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008	Nomor 08/ Rekom DPD PSI/BTN/2013, bertanggal 08 Januari 2013	610

16	Partai Karya Perjuanga n	Ketua : Asep Muhammad R. Sekre : Andika Putra	Nomor 16/SKEP/BP P.PAKAR PANGAN/X/2 012 tanggal 9 Oktober 2012	Nomor /DPK- TGR/I/2013 tanggal 15 Januari 2013	2,517	
17	Partai Demokrasi Kebangsa an	Ketua : Muhamadin Sekre : Yoyon Kheroni	Nomor PDK/ SK/PP- SJ/349/X/201 2 tanggal 12 Oktober 2012	Nomor PDK/ Rekom/PP- 57/006/XI/2012, bertanggal 7 November 2012	4,825	
18	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Ketua : Muhammad Kurbani Sekre : Aning PW	Nomor 2513/ SK/DPP/PPD I/V/2013	Nomor 09/DPC/ PPDI/III/2013 tanggal Maret 2013	885	
19	Partai Pengusah a Pekerja Indonesia	Ketua : Ade Irma Suryani Sekre : Tamrin Saiman	Nomor 010/A/ IN/16/SK- DPD- PPPI/BTN/IX/ 2012	MODEL B-KWK KPU, SK Kolektif, Nomor 001/ HANURA- KNP/VI/2013	1,810	
	JUMLAH					

Namun demikian, berdasarkan dokumen pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 4, bahwa pada tanggal 15 Juni 2013 KPU Kota Tangerang Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian mengeluarkan Kelengkapan Administrasi berkas pencalonan Pasangan Calon Ir. H. AHMAD MARJU KODRI Drs. **GATOT SUPRIJANTO** Nomor 312/KPU-KOTA-015.436421/VI/2013, dan Berita Acara Nomor 21/BA/VI/2013 yang isinya menyatakan kelengkapan administrasi pengajuan bakal calon walikota dan wakil walikota Tangerang oleh partai politik atau/gabungan partai politik tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat (TMS), dengan alasan PKPB tidak dimasukan dalam suara sah karena dianggap dobel atau dukungan ganda, PBB, PPI, dan Partai Merdeka tidak dimasukan karena dianggap sudah beralih ke calon lain, PPIB dan PDP yang menandatangani pengurus parpol tingkat provinsi, sehingga menurut KPU Kota Tangerang jumlah

- suara sah partai pengusung sebanyak 102.377 atau kurang 15% (minimal 104.910).
- 4. Bahwa Tanggal 16 22 Juni 2013 atau pada masa perbaikan berkas pencalonan, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. AHMAD MARJU KODRI Drs. GATOT SUPRIJANTO menyerahkan berkas perbaikan kepada KPU Kota Tangerang Tanggal 20 Juni 2013 dengan menyertakan penambahan dukungan partai baru yang tidak menggunakan hak pengusulan pada saat pendaftaran, yaitu Partai Buruh (1.082 suara) dan Partai Persatuan Nadlatul Umah Indonesia (1.721 suara), berikut didalamnya masih menyertakan dukungan dari Partai Hanura. Di mana pada masa perbaikan itu juga, yaitu Tanggal 21 Juni 2013, Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR menyerahkan berkas perbaikan syarat dukungan partai politik ke KPU Kota Tangerang dengan menyertakan Partai Hanura, sehingga terjadi dukungan ganda.
- 5. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juli 2013 KPU Kota Tangerang mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan berkas pencalonan Pasangan Calon Ir. H. AHMAD MARJU KODRI Drs. GATOT SUPRIJANTO Nomor 378/KPU-KOTA-015.436421/VII/2013, dan Berita Acara Nomor 29/BA/VII/2013 yang isinya menyatakan administrasi pengajuan bakal calon walikota dan wakil walikota tangerang oleh partai politik atau/gabungan partai politik tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat (TMS), dengan alasan Partai Persatuan Nahdlatul Umah Indonesia dan Partai Buruh tidak menggunakan haknya pada masa pendaftaran, dan Partai Hanura mengalihkan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR, sehingga menurut KPU Kota Tangerang jumlah suara sah partai pengusung sebanyak 74.068 atau kurang 15% (minimal 104.910).

# D. Hasil Pengawasan Proses Pemeriksaan Kesehatan Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. AHMAD MARJU KODRI - Drs. GATOT SUPRIJANTO.

 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-X/2013 dan Nomor 116/PHPU.D-X/2013 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013, yang memerintahkan kepada KPU Provinsi Banten untuk

- melaksanakan Pemeriksaan Tes Kesehatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. AHMAD MARJU KODRI Drs. GATOT SUPRIJANTO.
- Bahwa KPU Provinsi Banten telah melaksanakan Pemeriksaan Tes Kesehatan tersebut pada tanggal 9 Oktober 2013 oleh Tim Dokter IDI Tangerang, dan hasil pemeriksaan kesehatan diserahkan Tim Dokter IDI Tangerang tanggal 14 Oktober 2013.
- 3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. AHMAD MARJU KODRI - Drs. GATOT SUPRIJANTO Model BB5-KWK KPU yang ditandatangani Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus Dr. I Gede Rai Kosa, SpPD. Dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang. (dokumen hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani terlampir).
- [2.5] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 7 November 2013 yang pada pokonya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Pemohon mengakui tidak melakukan verifikasi faktual;
- Keterangan Termohon II dan Bawaslu Provinsi Banten tidak memastikan dukungan Partai Hanura yang sah terhadap pasangan calon;
- Berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pemberhentian KPU Kota Tangerang hanya sementara sampai pelaksanaan Pemilukada atau penghitungan suara Kota Tangerang;
- Seandainya putusan akhir Mahkamah memerintahkan Pemilukada ulang tanpa diikuti oleh pasangan calon yang tidak mendapat dukungan sah Partai Hanura, maka seyogyanya yang melaksanakan Pemilukada ulang adalah KPU Kota Tangerang, bukan KPU Provinsi Banten;
- [2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 7 November 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 7 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 November 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pihak Terkait berpendapat bahwa berdasarkan verifikasi administrasi pun yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten Terbukti bahwa dukungan Partai Hanura

yang telah diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto demi hukum tidak dapat dialihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (3) *juncto* Pasal 66 ayat (3) *juncto* Pasal 95 ayat (2) huruf g Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Pasal 9 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 berbunyi, "Partai Politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan";

Pasal 95 ayat (2) huruf g Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 berbunyi "Partai Politik atau gabungan partai politik sebagaiman dimaksud pada huruf f, tidak dapat menarik memindahkan dukungannya kepada bakal pasangan calon lain yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon";

Bahwa perlu juga diungkapkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, yang berbunyi "Dalam hal pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah sebagaiman dimaksud Pasal 63 memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang lebih awal didaftarkan."

Bahwa Partai Hanura telah memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto berdasarkan Surat Partai Hanura Nomor 001/HANURA-KPNP/VI dan kemudian bersama dukungan 25 partai politik pada tanggal 6 Juni 2013 mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Kota Tanggerang Tahun 2013;

Bahwa kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar tanpa dukungan Partai Hanura, melainkan hanya didukung oleh PPP, Partai Gerindra dan PKNU, pada tanggal 8 Juni 2013

mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Kota Tanggerang Tahun 2013. Perkembangan yang terjadi kemudian bahwa ternyata KPU Kota Tangerang menemukan fakta bahwa Partai Gerindra telah mengusung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Kota Tanggerang Tahun 2013 atas nama pasangan Arief R. Wismansyah dan Sachrudin, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar tidak memenuhi syarat minimal 15 persen suara dari partai politik pengusung disebabkan hanya didukung oleh PPP (5 kursi) dan PKNU (1 kursi) atau jumlah dukungan hanya 12 persen suara;

Bahwa kemudian muncul fakta baru bahwa pada "Masa Perbaikan Kelengkapan Persyaratan Administrasi dalam Tahapan Pemilukada Kota Tangerang 2013, dari 16 sampai 29 Juni 2013" ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar menambah dukungan partai politik pengusung dari Partai Hanura (2 kursi) berdasarkan Surat Partai Hanura Nomor SKEP/B/683/DPP-HANURA/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013.

**Tabel Tahapan Pendaftaran** 

Tanggal	Kegiatan	Tanggal	Kegiatan
Tahapan	Tahapan	Fakta	Fakta
02-08 Juni 2013	Pendaftaran	06/6/2013	ARW-Sach, mendaftar deng-an dukungan Partai Demok-rat, Partai Gerindra dan PKB
			AMK-GS, mendaftar dengan dukungan Partai Hanura dan 25 Partai non- parlemen
		08/6/2013	HMZ-I, mendaftar dengan dukungan Partai Gerindra, PPP dan PKNU
09-15 Juni 2013	Penelitian	15/6/2013	Pengumuman KPU Kota Tangerang:  Dukungan Partai Gerindra kepada ARW-Sach;
			HMZ kurang dukungan suara partai politik pendukung
			AMK kurang dukungan suara partai politik pendukung

16-29 Juni	Masa		Partai Hanura mengalihkan dukungan
2013	Perbaikan	18/6/2013	kepada HMZ dari AMK
		20/6/2013	AMK melengkapi syarat dukungan partai politik pendukung
30 Juni 13 Juli 2013	Penelitian Ulang	13/7/2013	KPU Kota Tangerang menya-takan: HMZ memenuhi syarat dukungan partai politik pendukung;  AMK tidak memenuhi syarat dukungan partai politik pendukung.

### **Keterangan:**

- ARW-Sach: H. Arief R. Wismansyah, B.Sc., M.Kes Drs. H. Sachrudin, Pasangan Calon Nomor Urut 5
- 2). AMK-GS: Ir. Ahmad Marju Kodri Drs. Gatot Supriyanto, Pasangan Calon Nomor Urut 4
- 3). HMZ-I: Dr. H.M. Harry Mulya Zein Iskandar, S.Ag., Pasangan Calon Nomor Urut 1

Berdasarkan fakta adanya dukungan Partai Hanura kepada Pasangan Calon Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, yang semula diberikan kepada Pasangan Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto, adalah tindakan ilegal yang bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012;

Dengan demikian, berdasarkan atas hukum KPU Provinsi Banten telah benar menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar tidak memenuhi syarat dukungan minimal partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dinyatakan dalam "Laporan KPU Provinsi Banten tentang Verifikasi Ulang Pengusulan Partai Politik terhadap Pasangan Calon Dr.H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar serta Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto dan Pemeriksaan Kesehatan terhadap Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto" bertanggal 21 Oktober, yang dibacakan dalam sidang Mahkamah tanggal 7 November 2013;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pihak Terkait berkesimpulan bahwa KPU Provinsi Banten tidak perlu melakukan verifikasi faktual terhadap

dukungan partai politik pendukung (Partai Hanura) terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr.H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar serta Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto, disebabkan karena tidak ada perintah dari Mahkamah sebagaimana Amar Putusan Mahkamah Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 juncto Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 -- serta satu dan lain hal verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten telah membuktikan realitas dukungan partai politik, yaitu PARTAI HANURA, kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto bukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr.H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar dukungan Partai Hanura diberikan;

Oleh karena itu, demi hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Kota Tangerang Tahun 2013 dan membatalkan perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar pada Pemilihan Umum Kota Tangerang Tahun 2013.

#### II. Petitum

Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Kontitusi menjatuhkan Putusan Akhir sebagai berikut:

- Menerima Tanggapan Pihak Terkait atas "Laporan KPU Provinsi Banten tentang Verifikasi Ulang Pengusulan Partai Politik terhadap Pasangan Calon Dr.H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar serta Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto dan Pemeriksaan Kesehatan terhadap Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto";
- 2. Menerima dan membenarkan "Laporan KPU Provinsi Banten tentang Verifikasi Ulang Pengusulan Partai Politik terhadap Pasangan Calon Dr.H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar serta Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto dan Pemeriksaan Kesehatan terhadap Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto" serta "Laporan Hasil Pengawasan Atas Putusan MK Nomor 115-116/PHPU.D-XI/2013, tertanggal 1 November, Perihal PHPU Kota Tanggerang Tahun 2013";

- 3. Menolak Tanggapan para Pemohon atas "Laporan KPU Provinsi Banten tentang Verifikasi Ulang Pengusulan Partai Politik terhadap Pasangan Calon Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar serta Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto dan Pemeriksaan Kesehatan terhadap Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto" untuk seluruhnya;
- Menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar pada Pemilihan Umum Kota Tangerang Tahun 2013;
- 5. Menyatakan tetap sah dan tetap mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tanggal 06 September 2013, dengan menyatakan batal perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar pada Pemilihan Umum Kota Tangerang Tahun 2013;
- 6. Menyatakan tetap sah dan tetap mengikat secara hukum Keputusan Termohon II Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 6 September 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, dengan menyatakan batal perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar pada Pemilihan Umum Kota Tangerang Tahun 2013;
- 7. Menyatakan tetap sah dan tetap mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 6 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
- [2.7] Menimbang bahwa Mahkamah dalam persidangan tanggal 11 November 2013 telah mendengar keterangan dari pengurus Partai Hanura yang diwakili oleh Arif Fadilah, Wakil Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Tangerang, Oon Rosdiana dan Agus Subari, Wakil Ketua dan Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Banten, serta Fuad Syauqi, Ketua Korda Banten yang menerangkan sebagai berikut:

- Partai Hanura pada tanggal 6 Juni 2013 mendaftarkan Pasangan Calon Ir. H.
   Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto (AMK dan Gatot) sebagai Bakal
   Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
- Pencalonan AMK dan Gatot tersebut didasarkan pada rekomendasi dari DPP
   Partai Hanura;
- Pada tanggal 15 Juni 2013, KPU Kota Tangerang menerbitkan surat yang pada pokoknya menyatakan syarat pencalonan Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang atas nama Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Gatot Supriyanto tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat (TMS);
- Setelah mendapat surat tersebut, DPC Partai Hanura Kota Tangerang berkomunikasi dengan DPP Partai Hanura pada pokoknya supaya DPP Partai Hanura mengalihkan dukungan kepada pasangan calon yang lain;
- Pada tanggal 18 Juni 2013, DPP Partai Hanura mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SKEP/B/683/DPP-HANURA/V/2013 pada pokoknya mencabut dukungan mencabut dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Gatot Supriyanto dan menetapkan dukungan kepada Dr. H. Harry Mulya Zein, M.Si., dan Iskandar, S.Ag. sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
- Pada tanggal 20 Juni 2013, Ketua/Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Tangerang bersama-sama dengan Dr. Harry Mulya Zein dan Iskandar, S.Ag mendaftarkan ke KPU Kota Tangerang;
- Setelah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi a quo, saksi tidak pernah menerima kedatangan dari KPU Provinsi Banten untuk mendapatkan verifikasi dukungan Partai Hanura;

Selain menyampaikan keterangan dalam persidangan, DPC Partai Hanura Kota Tangerang juga menyampaikan Surat Nomor 198/III/DPC-Hanura/A-C/X/2013, perihal Pernyataan sikap dan pernyataan dukungan DPC Hanura Kota Tangerang, bertanggal 21 Oktober 2013 dan Surat Nomor 200/III/DPC-HANURA/A-C/XI/2013, Perihal kronologis dan penegasan sikap dukungan Partai Hanura Terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, bertanggal 11 November 2013. Kedua surat DPC Partai Hanura tersebut pada pokoknya sama dengan keterangan pengurus DPP Hanura sebagaimana diuraikan di atas, yaitu antara lain:

- DPP Hanura telah mencabut dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Gatot Supriyanto dan mengalihkan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Dr. Harry Mulya Zein dan Iskandar, S.Ag;
- 2. Pencabutan dan pengalihan dukungan Partai Hanura tersebut karena adanya Surat dari KPU Kota Tangerang Nomor 312/KPU-Kota-015.436421/VI/2013, bertanggal 15 Juni 2013 yang berisi Hasil Penelitian Administrasi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Gatot Supriyanto tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat (TMS) dukungan partai politik atau gabungan partai politik sebanyak 15% kursi anggota DPRD atau 15 % suara sah;
- Partai Hanura hingga sampai saat ini tetap mendukung secara resmi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Periode 2013 – 2018 atas nama Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar;
- [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, bertanggal enam bulan September tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-3 = bukti T-3 = bukti PT.2-22) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, bertanggal 6 September 2013 (vide bukti P-4 = bukti T-2 = bukti PT.2-23);

### Pendapat Mahkamah

#### Pokok Permohonan

- [3.2] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon I, jawaban Termohon II, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan, dan keterangan ahli dan saksi dari para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- [3.3] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon II mengesahkan dukungan Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si. dan Iskandar, S.Ag. dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto secara ganda. Menurut Pemohon, persyaratan dukungan partai politik kepada kedua pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-16.a, P-21, P-22, dan bukti P-23, ahli Prof. H.A.S. Natabaya, S.H.,L.L.M. dan Dr. Maruarar Siahaan, S.H., serta saksi Aulia Epriya Kembara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon I dan Termohon II membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar mengembalikan hak konstitusional bakal pasangan calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto untuk menjadi peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, tanpa mengesampingkan hak konstitusional pasangan calon lainnya;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon I dan Termohon II mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-5, T-7, dan bukti T-8, serta ahli Dra. Endang Sulastri, M.Si.;

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya sama dengan bantahan Termohon I dan Termohon II tersebut di atas;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT. 2 – 1, PT.2 – 2, dan PT. 2– 3, ahli Prof. Dr.

Saldi Isra, S.H., M.P.A. dan Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., serta saksi Imron Khamami, S.H.;

Menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dalam Putusan Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 1 Oktober 2013, pukul 16.31 WIB, Mahkamah telah memerintahkan KPU Provinsi Banten (Termohon II) untuk melakukan verifikasi ulang pengusulan partai politik terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si. dan Iskandar, S.Ag. serta Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto. Hasil verifikasi ulang tersebut telah diputus dalam Putusan Mahkamah Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 19 November 2013, pukul 10.27 WIB yang menyatakan bahwa Partai Hanura hanya memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si. dan Iskandar, S.Ag;

[3.4] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon II meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Tangerang tanpa melalui tes kesehatan. Menurut Pemohon, Termohon II telah melanggar ketentuan Pasal 58 huruf e UU Pemda yang menyatakan, "Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter";

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-11, P-21, P-22, dan bukti P-23, ahli Prof. H.A.S. Natabaya, S.H.,L.L.M. dan Dr. Maruarar Siahaan, S.H. serta saksi Aulia Epriya Kembara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon I dan Termohon II mengajukan bantahan yang pada hakikatnya sama dengan bantahan pada paragraf [3.3];

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon I dan Termohon II mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-5 dan bukti T-9, serta ahli Dra. Endang Sulastri, M.Si.;

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon II melaksanakan putusan DKPP agar mengembalikan hak konstitusional bakal pasangan calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto untuk menjadi peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang. Lagipula, permasalahan tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang Nomor 30/G/2013/PTUN.SRG, bertanggal 30 Agustus 2013, yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat (Pemohon) tidak dapat diterima;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.2-25 dan bukti PT.2 – 35, ahli Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A. dan Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., serta saksi Imron Khamami, S.H.;

Menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dalam Putusan Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 1 Oktober 2013, pukul 16.31 WIB, Mahkamah telah memerintahkan KPU Provinsi Banten (Termohon II) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto. Hasil pemeriksaan kesehatan tersebut telah diputus dalam Putusan Mahkamah Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 19 November 2013, pukul 10.27 WIB yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto dinyatakan sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai walikota dan wakil walikota. Namun oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto dinyatakan gugur sebagai pasangan calon oleh Mahkamah maka hasil pemeriksaan kesehatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.5] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon II meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 5 H. Arief R. Wismansyah, B.Sc.,M.Kes. dan Drs. H. Sachrudin (Pihak Terkait), namun Drs. H. Sachrudin sebagai Calon Wakil Walikota Tangerang tidak dapat menyampaikan izin dari atasannya dan tetap melakukan aktivitasnya sebagai Camat Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, dan bukti P-37, ahli Dr. Maruarar Siahaan, S.H., serta saksi Aulia Epriya Kembara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon I dan Termohon II membantah yang pada pokoknya bahwa Termohon I dan Termohon II tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena melaksanakan putusan DKPP agar mengembalikan hak konstitusional bakal pasangan calon H. Arief R. Wismansyah, B.Sc.,M.Kes. dan Drs. H. Sachrudin (Pihak Terkait) untuk menjadi peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang;

Termohon I dan Termohon II tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan saksi/ahli yang berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*;

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa izin atasan dimaksud tidak diperlukan. Lagipula, Drs. H. Sachrudin sebagai Calon Wakil Walikota Tangerang (Pihak Terkait) telah melengkapi persyaratan administrasi bakal calon Wakil Walikota Tangerang kepada Termohon I dengan mengisi Formulir Surat Pernyataan Pengunduran diri dan Tidak Aktif dalam Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil (Model BB11-KWK.KPU Partai Politik);

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.2 – 7, PT.2–9, dan buki PT.2 – 9a, ahli Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A, serta saksi Imron Khamami, S.H. dan Arsani Maidi, S.T.;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 1 Oktober 2013, yang menyatakan, "Keputusan KPU Kota Tangerang yang tidak meloloskan Pasangan Calon H. Arief R. Wismansyah, BSc, M.Kes – Drs. H. Sachrudin karena tidak adanya keputusan pemberhentian Drs. H. Sachrudin dalam jabatan negeri sebagai camat, adalah tidak beralasan hukum. Undang-undang hanya mewajibkan bagi PNS yang sedang menjabat jabatan negeri untuk mengajukan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri tanpa harus menunggu keputusan pemberhentian dari atasan" (vide Putusan Mahkamah Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 1 Oktober 2013, halaman 114). Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.6] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait melakukan politik uang dengan cara membagikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara langsung kepada masyarakat. Bahkan tim sukses Pihak Terkait membagikan batik kepada anggota KPPS atas nama Madali pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2013, pukul 10.00 WIB, di RT.02/03, Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-38 dan bukti P-40, serta saksi Aufariko Punce dan Muhammad Lutfi:

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Lagipula, Panwaslukada Kota Tangerang menilai bahwa laporan Pemohon menyangkut politik uang dan pembagian batik tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur politik uang dan dianggap tidak cukup bukti;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.2- 26 dan bukti PT.2- 28, serta saksi Dasep, S.T.;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, bukti Pemohon berupa foto pembagian uang oleh Drs. H.Sachrudin (Pihak Terkait) (vide bukti P-38) dan tanda bukti penerimaan laporan Panwas (vide bukti P-40), serta keterangan saksi Pemohon Aufariko Punce dan Muhammad Lutfi, yang menerangkan bahwa Pihak Terkait membagikan uang pada saat melakukan kampanye, tidak cukup meyakinkan bahwa Pihak Terkait memang benar melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bukti Pihak Terkait berupa pemberitahuan status laporan/temuan oleh Panwaslukada Kota Tangerang dan keterangan saksi Pihak Terkait Dasep, S.T. justru membuktikan bahwa tindakan Pihak Terkait sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu dan saksi tidak dapat hadir untuk diklarifikasi (vide bukti PT.2– 26 dan bukti PT.2– 28). Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait menggerakkan salah satu unsur Pemerintah Kota Tangerang dengan cara

menggunakan laman <u>www.uptdpinang.com</u> milik Kecamatan Pinang, Kota Tangerang dan memasang alat peraga bergambar Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-39 dan bukti P-41, tanpa mengajukan saksi yang berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar karena Pihak Terkait beserta tim suksesnya tidak menggunakan laman tersebut. Lagipula, Panwaslukada Kota Tangerang menilai bahwa laporan Pemohon menyangkut penggunaan laman <a href="www.uptdpinang.com">www.uptdpinang.com</a> oleh Pihak Terkait tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.2 – 27 dan bukti PT.2 – 37, tanpa mengajukan saksi yang berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki cukup bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan Pihak Terkait tersebut memenuhi unsur pelanggaran Pemilu. Pihak Terkait justru mampu membuktikan bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar karena berdasarkan surat pemberitahuan status laporan/temuan, Panwaslukada Kota Tangerang menilai bahwa tindakan Pihak Terkait tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu (vide bukti PT.2 – 27). Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa penyelenggara Pemilu berpihak kepada Pihak Terkait, yakni ketua dan anggota KPPS TPS 20 Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang menyebarkan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) kepada masyarakat disertai dengan stiker/alat peraga untuk memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-42, serta saksi Midan dan Riko;

Terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon I dan Termohon II membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon a quo

merupakan ranah Panwaslukada Kota Tangerang untuk menangani pelanggaran Pemilukada. Lagipula, Panwaslukada Kota Tangerang tidak pernah memberikan rekomendasi menyangkut permasalahan tersebut kepada Termohon I dan Termohon II:

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon I dan Termohon II mengajukan saksi K. Haryanto, Ruminah, Marno, dan H. Ishak Purhawanto, tanpa mengajukan bukti surat/tulisan yang berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*;

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan ketua dan anggota KPPS di TPS 20 untuk menyertakan stiker/alat peraga untuk memilih Pihak Terkait;

Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan saksi untuk membantah dalil Pemohon *a quo*;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, bukti Pemohon yang diberi tanda bukti P-42 hanya merupakan tanda bukti penerimaan laporan dari Panwaslukada Kota Tangerang, namun bukti tersebut tidak dapat membuktikan keberpihakan penyelenggara Pemilu kepada Pihak Terkait yang memenuhi unsur pelanggaran Pemilu. Adapun keterangan saksi Pemohon Midan dan Riko yang menerangkan bahwa surat undangan memilih menjadi satu dengan stiker Pihak Terkait terbantahkan oleh keterangan saksi Termohon K. Haryanto, Ruminah, Marno, dan H. Ishak Purhawanto yang menerangkan bahwa KPPS hanya diperintahkan untuk membagikan Model C-6 kepada pemilih tanpa stiker Pihak Terkait. Lagipula, tidak ada rekomendasi Panwaslu berkaitan dengan adanya pelanggaran Pemilukada Kota Tangerang dan tidak ada pula pelanggaran di masing-masing TPS. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2013, bertempat di Masjid Fatahillah, Sudimara Timur, Ciledug, Kota Tangerang, H. Arief R. Wismansyah, B.Sc, M.Kes. (Pihak Terkait) melakukan kampanye di masjid tersebut dengan ajakan untuk memilih Pihak Terkait:

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi Tohirudin A. Ghani dan Rudi Hendrawan, tanpa mengajukan bukti surat/tulisan yang berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat itu H. Arief R. Wismansyah, B.Sc, M.Kes. (Pihak Terkait) hanya melakukan salat maghrib berjamaah dan tidak melakukan kampanye. Lagipula, Panwaslukada Kota Tangerang menilai bahwa laporan Pemohon menyangkut dugaan kampanye tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.2– 29, serta saksi Jamaludin;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, keterangan saksi Pemohon Tohirudin A. Ghani dan Rudi Hendrawan tidak cukup meyakinkan Mahkamah, tanpa didukung dengan alat bukti lain. Bahkan, berdasarkan keterangan saksi Pemohon Rudi Hendrawan, tidak dapat dipastikan apakah H. Arief R. Wismansyah, B.Sc, M.Kes. (Pihak Terkait) melakukan orasi politik atau tidak. Lagipula, berdasarkan bukti Pihak Terkait PT.2-29, Panwaslukada Kota Tangerang menilai bahwa tindakan Pihak Terkait tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- [3.10] Menimbang bahwa tentang pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;
- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil dan alasan hukum permohonannya;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

# 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan November, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pada pukul 10.50 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi

oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon I dan/atau kuasanya, Termohon II dan/atau kuasanya, serta Pihak Terkait dan/atau kuasanya.

# KETUA,

ttd.

## Hamdan Zoelva

# ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Arief Hidayat Muhammad Alim

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Harjono

ttd. ttd.

Anwar Usman Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

**Patrialis Akbar** 

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**Dewi Nurul Savitri**